



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAKASSAR

NOMOR HK.02.02.20A.12.25.251 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
MAKASSAR TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf
a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan
Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di
Makassar tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di
Makassar Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

- Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI MAKASSAR TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Makassar memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Makassar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. Acuan bagi Balai Besar POM di Makassar dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. Dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Makassar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal : 5 Desember 2025

Kepala Balai Besar POM di Makassar,



YOSEF DWI IRWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
NOMOR HK.02.02.20A.12.25.251 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MAKASSAR
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dokumen ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional bagi seluruh unsur di lingkungan BBPOM di Makassar dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan selama lima tahun ke depan, selaras dengan *Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025–2029* sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan, BBPOM di Makassar berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan kesehatan masyarakat yang optimal melalui pengawasan yang kredibel, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana strategis ini disusun untuk menegaskan peran BBPOM di Makassar dalam mendukung misi nasional BPOM, yaitu memperkuat sistem pengawasan yang efektif, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan obat dan makanan.

Periode 2025–2029 merupakan momentum penting bagi BBPOM di Makassar untuk bertransformasi menuju institusi pengawasan yang lebih modern, berbasis risiko, serta berorientasi pada pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam kerangka *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran*, BBPOM di Makassar menempatkan efisiensi, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi pelayanan sebagai landasan utama pencapaian kinerja.

Dokumen Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta indikator kinerja utama yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas BBPOM di Makassar. Penyusunannya didasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya (2020–2024), dinamika lingkungan strategis, serta isu-isu aktual di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk penguatan *regulatory assistance* bagi UMKM, transformasi digital pengawasan, dan penerapan *Good Regulatory Practices*.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan dukungan, sinergi, dan komitmen seluruh pihak baik internal BBPOM di Makassar maupun pemangku kepentingan eksternal, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Semoga dokumen ini menjadi acuan bersama dalam mewujudkan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing bagi masyarakat Sulawesi Selatan serta mendukung pencapaian *Indonesia Emas 2045*.

BAB 1

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

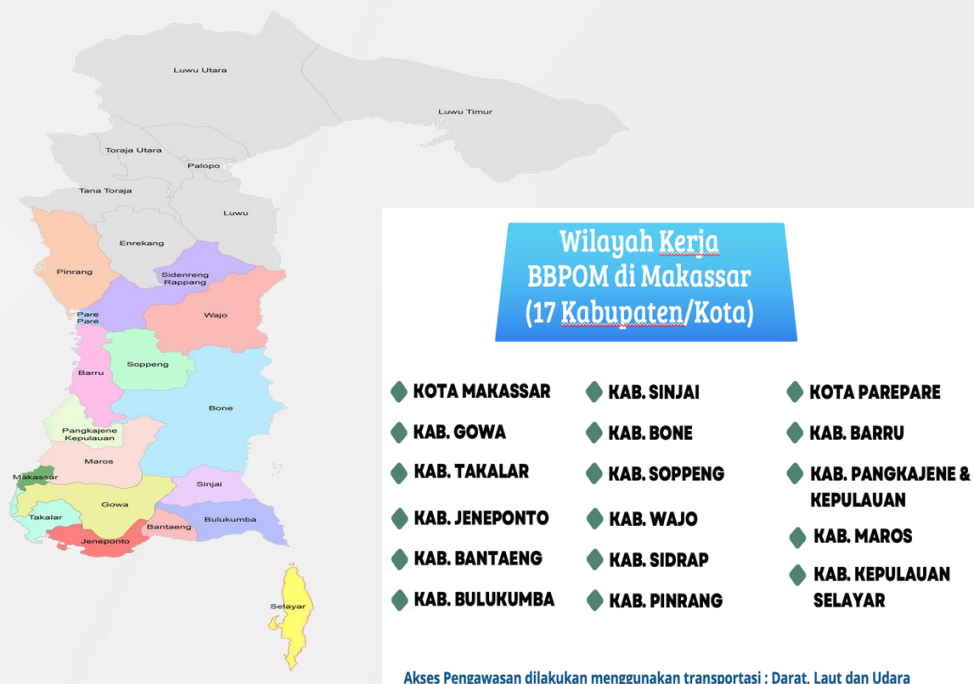
BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah sekitar 46.717 km², terdiri atas 24 kabupaten/kota yang meliputi 21 kabupaten dan 3 kota, dengan total lebih dari 300 kecamatan, 780 kelurahan, dan 2.000 desa, merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di kawasan timur Indonesia. Wilayah ini memiliki posisi strategis pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menghubungkan jalur perdagangan nasional dan internasional antara bagian barat dan timur Indonesia.

Wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar mencakup 17 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan karakter geografis yang beragam mulai dari wilayah pesisir maritim, kawasan perkotaan padat penduduk, hingga daerah pegunungan dan pedalaman. Kondisi geografis ini menciptakan pola konsumsi, produksi, dan distribusi produk pangan dan obat yang kompleks. Sebagai pintu gerbang logistik bagi Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi Selatan memiliki tingkat mobilitas barang yang tinggi, menjadikannya simpul utama peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan dari berbagai wilayah Indonesia.

Wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.1. Peta Wilayah kerja BBPOM di Makassar

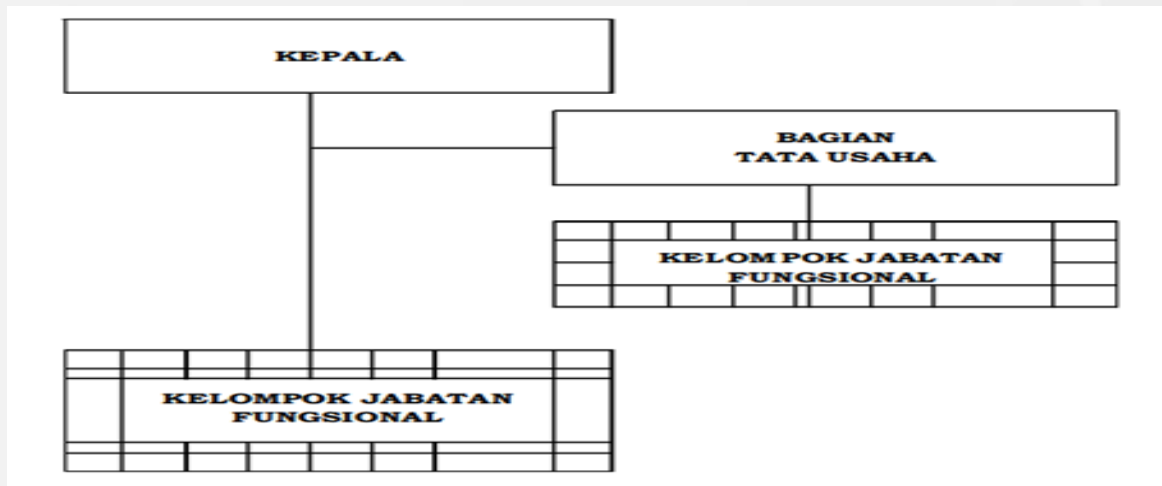
Karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan dikenal adaptif, religius, dan memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat, dengan nilai budaya lokal yang menekankan penghormatan, etika, serta solidaritas sosial. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri kecil-menengah merupakan tulang punggung ekonomi daerah ini. Dinamika tersebut melahirkan ribuan pelaku UMKM di sektor pangan dan kosmetik, yang menjadi potensi ekonomi unggulan sekaligus menuntut pengawasan yang intensif terhadap kepatuhan terhadap standar keamanan, mutu, dan peredaran produk.

Tantangan pengawasan di wilayah Sulawesi Selatan meliputi kesenjangan pemahaman regulasi di kalangan pelaku usaha mikro, meningkatnya perdagangan daring lintas daerah, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap produk herbal dan suplemen kesehatan. Faktor-faktor tersebut menuntut BBPOM di Makassar untuk memperkuat pendekatan pengawasan berbasis risiko, memperluas edukasi publik, dan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor.

Dalam menjawab tantangan tersebut, BBPOM di Makassar berperan sebagai perpanjangan tangan Badan Pengawas Obat dan Makanan di tingkat daerah, yang menjalankan fungsi teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Kedudukan lembaga ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam konteks strategis tersebut, BBPOM di Makassar berperan sebagai garda terdepan Badan POM dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Tugas pengawasan tidak hanya ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung daya saing produk lokal agar mampu berkompetisi di pasar nasional dan global.

Balai Besar POM di Makassar dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan membawahi Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. Berdasarkan data pegawai per Oktober 2025, terdapat 121 ASN (110 PNS dan 11 PPPK).

Capaian Kinerja Rencana Strategis BBPOM di Makassar Tahun 2020 – 2024

Tabel 1.3. Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM Makassar Tahun 2020 sampai dengan 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)	T	R	(%)
				2020			2021			2022			2023			2024		
Stakeholder Perspective																		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	88,0 ₉	109,0 ₂	89	95,4 ₅	107,2 ₅	90	96,67	107,4 ₁	91,00	98,18	107,8 ₉	98,20	93,2	94,91
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	85,8 ₆	110,0 ₈	85,5	86,0 ₄	100,6 ₃	87	94	107,8 ₅	88,50	93,28	105,4 ₀	93,30	89	95,39
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,6	83,4 ₂	103,5 ₀	87	92,5 ₈	106,4 ₁	88	93	105,2 ₃	89,00	92,71	104,1 ₇	92,80	87,8 ₅	94,67
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	77,4 ₂	99,26	77	79,0 ₂	102,6 ₂	78	92,18	118,1 ₈	80,00	95,45	119,3 ₁	95,50	96,3 ₂	100,8 ₆
		5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat				75	60	80,00	76	80	105,2 ₆	77,00	88,42	114,8 ₃	87,00	74,0 ₃	85,09

2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	74	76,36	103,19	79	74,11	93,81	81	79,41	98,04	83,00	83,85	101,02	85,00	79,08	93,04
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	83	82,5	99,40	83,5	87,3	104,55	84,6	91	107,09	85,60	97,60	114,02	97,70	97,72	100,02
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	69	73,94	107,16	75,5	70,84	93,83	77	73,84	95,90	78,50	77,96	99,31	80,00	81,31	101,64
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	89	93,31	104,84	90	92,04	102,27	93	91,90	98,82	93,50	94,90	101,50	95,50	94,44	98,89
Internal Process Perspective																		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	68,19	78,38	89	100	112,36	91	100,00	109,89	93,00	95,24	102,41	95,00	100	105,26
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	51,91	94,38	60	74,89	124,82	65	72,81	112,02	70,00	58,42	83,46	75,00	83,81	111,75
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	96,43	113,45	96	94,08	98,00	98	97	98,94	99,00	97,42	98,40	98,00	99	101,02

		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	47,81	103,93	55	65,6	119,27	60	59,18	98,63	65,00	71,12	109,42	71,20	76,7	107,72
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	72,95	132,64	75	80,26	107,01	76	75,46	99,29	78,00	78,25	100,32	80,00	82,81	103,51
		15	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,48	99,15	4,2	4,35	103,57	4,3	4,56	106,05	4,40	4,61	104,77	4,70	4,79	101,91
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77	89,33	116,01	79,00	79,37	100,47	100,00	100	100,00
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95,00	81,66	85,96
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,16	92,41	108,51	92	92,85	100,92	93	93,13	100,14	94,00	94,84	100,89	95,70	96,27	100,60
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100,00	40	40	100,00	68	68	100,00	98,00	98,00	100,00	124,00	124	100,00
		20	Jumlah desa pangan aman	4	4	100,00	12	12	100,00	19	19	100,00	25,00	25,00	100,00	31,00	31	100,00
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100,00	8	8	100,00	13	13	100,00	18,00	18,00	100,00	22,00	22	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	95,21	112,01	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,93	99,93

	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	92,57	123,43	100	100	100,00	100	100	100,00	100,00	99,37	99,37	100,00	100	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	98,04	146,33	88	90,33	102,65	91	97	106,89	94,00	87,33	92,90	97,00	81,77	84,30
Learning and Growth Perspective																		
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Makassar yang optimal	25	Indeks RB Balai Besar POM di Makassar	85	50,45	59,35	77,8	77,81	100,01	79,8	89,06	111,60	81,80	90,51	110,65	91,51	90,25	98,62
		26	Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar	81	77,27	95,40	78,3	78,13	99,78	79,3	79,21	99,89	80,30	81,05	100,93	82,45	81,9	99,33
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan													89,47	94,35	105,45
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Makassar yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar	75	73,49	97,99	75	85,44	113,92	76	81,14	106,76	77,00	89,64	116,42	86,85	87,25	100,46
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Pengawasan Sediaan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78,8	70,6	89,59	76	75,43	99,25	81	78,80	97,28	86,00	84,40	98,14	85,44	89,96	105,29

	Farmasi dan Pangan Olahan	30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Makassar yang optimal	1,51	1,32	87,42	2	1,62	81,00	2,25	2,9	128,00	2,50	2,90	116,00	3,00	3,00	100,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Makassar secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar	93	93,07	100,08	95,8	90,84	94,82	95,9	89,48	93,31	96,20	89,92	93,47	90,03	90,80	100,86
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													81,56	95,00	116,48
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													49,00	95,59	195,08
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri													60,00	64,06	106,77

(Sumber: Laporan Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

- *) IKU 6,7,8 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama No: B-RK.02.2.12.24.940 tgl 16 Desember 2024
- *) IKU 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM RI
- *) IKU 25 Indeks RB UPT berdasarkan surat Inspektur Utama No: B-PI.06.06.7.11.24.658 tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024
- *) IKU 26 Nilai AKIP UPT berdasarkan surat Inspektur Utama No: B-PI.06.08.7.01.25.02 tanggal 2 Januari 2025 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
- *) IKU 28 Indeks Profesionalitas ASN UPT berdasarkan surat dari Biro SDM No: B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024
- *) IKU 29 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP berdasarkan surat kepala P3OMN No.: T-02.01.10.12.24.507 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar/ Balai POM Tahun 2024
- *) IKU 32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Berdasarkan nota dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor B- KP.09.01.25.01.25.37 tanggal 9 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- *) IKU 33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan surat Kepala Biro Umum Nomor B-PL.03.01.25.01.25.12 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM
- *) IKU 34 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan nota dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor B-KP.09.01.25.01.25.37 tanggal 9 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

BBPOM di Makassar memiliki 11 Sasaran Strategis (SS) dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan, dan (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

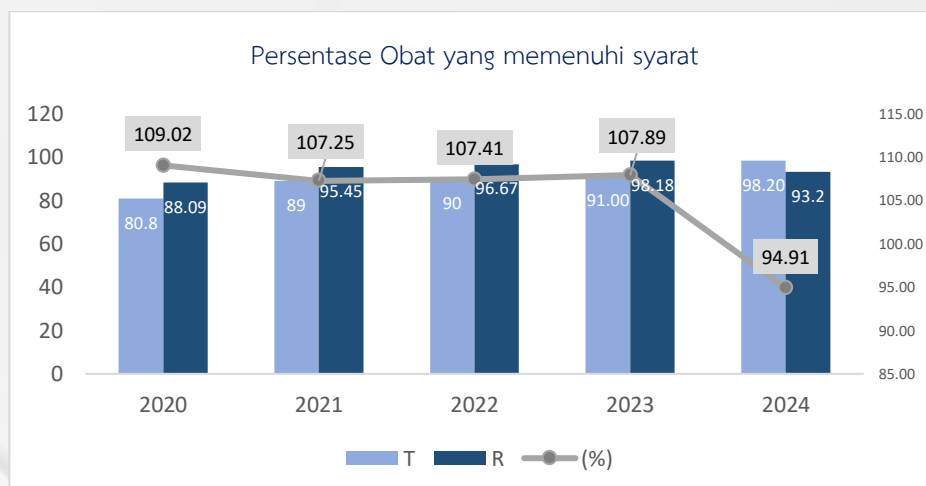
Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, 3 (tiga) indikator yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat memperoleh capaian kinerja di atas 100%, sedangkan 2 (dua) indikator yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hanya tidak mencapai 100 % (99,13% dan 96,96%).

Kedua indikator yang tidak mencapai target disebabkan oleh beberapa hal a.1 untuk Indikator ke (2) dari 957 sampel yang diuji, terdapat 77 sampel pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil uji maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) terkait penandaan dengan rincian yaitu 62 sampel TMS Uji, 11 sampel TMK Penandaan dan 4 sampel TMS Uji dan TMK Penandaan. Untuk Indikator ke (3) dari 669 sampel yang diuji, terdapat 54 sampel sampel obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hasil uji maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) terkait penandaan dengan rincian yaitu 29 sampel TMS Uji (Obat 2 sampel, Obat Bahan Alam 18 sampel, Kosmetik 8 sampel dan rokok 1 sampel), 21 sampel TMK Penandaan (Obat Bahan Alam 6 sampel dan kosmetik 15 sampel), 4 sampel TMKS uji dan TMK Penandaan.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan pemeriksaan terhadap sarana yang memproduksi produk obat bahan alam dengan TMS Uji.
- Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terhadap produk pangan dengan hasil uji TMS dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait jika terdapat produk pangan PIRT yang TMS.
- Melakukan Bimtek terhadap industri obat bahan alam terkait Bimbingan Teknis Persyaratan Teknis Mutu Obat Bahan Alam Bagi Pelaku Usaha yang dilakukan tanggal 30 September 2024 yang dihadiri oleh 25 sarana UKOT dan UMOT yang memiliki riwayat hasil pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan (TMK). Materi yang diberikan adalah terkait Penyebab Kontaminasi Mikrobiologi pada Obat Bahan Alam dan Pencegahannya serta Penerapan CPOTB (syarat mutu produk Obat Bahan Alam, Handling bahan baku dan proses produksi untuk mencegah kontaminasi mikrobiologi) dengan narasumber dari Dosen Fakultas Farmasi Unair dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM.
- Melakukan desk CAPA terkait hasil pemeriksaan sarana produksi yang belum menerapkan CPPOB dengan baik pada tanggal 17 Desember 2024

IKSK 1.1. : Persentase Obat yang memenuhi syarat

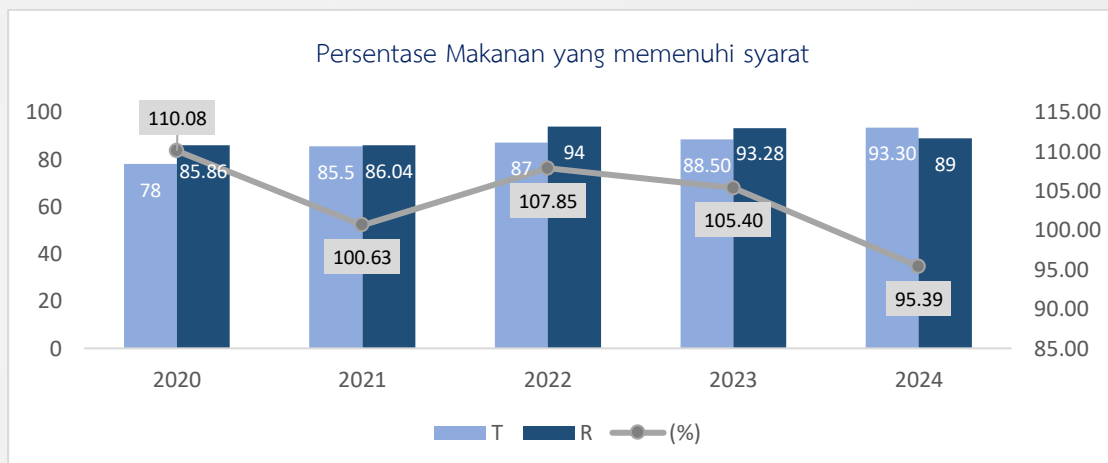


Pengukuran terhadap indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat didasarkan pada kerangka sampling random dengan beberapa kriteria yaitu (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 107%, sehingga masuk dalam kategori “*Sangat Baik*”. Pada tahun 2024, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 93,20 tidak mencapai target 98,20, dengan capaian hanya 94,91% kategori “*Cukup*”

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,20 %. Hal ini disebabkan Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 1.161 sampel, terdiri atas 1.082 sampel memenuhi syarat dan 79 sampel yang tidak memenuhi syarat (0 TIE/Ilegal/Palsu; 0 TMK Kedaluarsa, 0 TMK Rusak, 79 TMS Uji Laboratorium). Total 79 sampel Obat TMS uji terdiri atas 3 obat. 11 obat tradisional, 1 Obat Kuasi, 8 suplemen Kesehatan, 56 kosmetik.

IKSK 1.2 : Persentase Makanan yang memenuhi syarat



Pengukuran terhadap indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat didasarkan pada kerangka sampling random dengan beberapa kriteria yaitu (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

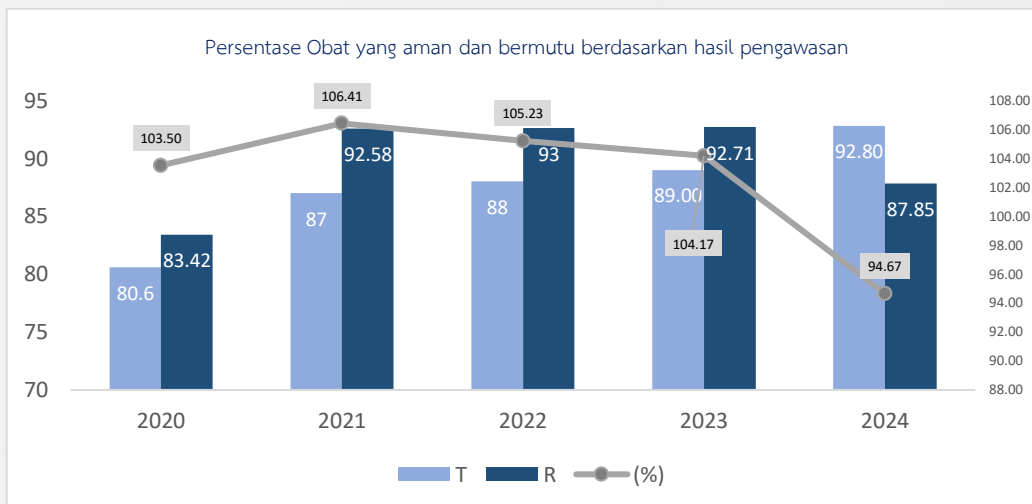
tren capaian indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menunjukkan kinerja yang konsisten di atas target pada periode 2020–2023. Namun penurunan capaian di tahun 2024 menjadi early warning agar BBPOM Makassar memperkuat strategi pengawasan, pembinaan UMKM, dan penguatan edukasi masyarakat serta kolaborasi lintas sektor untuk mengantisipasi penurunan kepatuhan dan kualitas produk pangan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 belum mencapai target yaitu 95,39 % dengan kriteria “*Cukup*” hal ini disebabkan dari pemeriksaan 600 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM

di Makassar, dengan hasil 534 sampel MS (memenuhi syarat), 66 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Banyaknya sampel yang TMK Penandaan merupakan persentase terbesar dalam menyumbang jumlah total TMS (55% dari total TMS), karena untuk sampel acak, sampel TMK penandaan tetap dihitung sebagai TMS, meskipun hasil uji MS.

IKSK 3 : Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

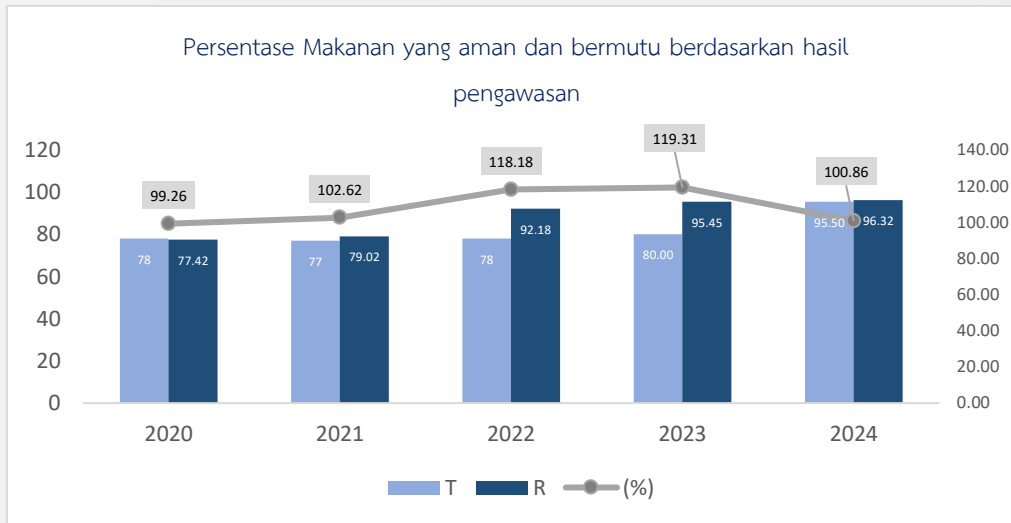
Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *targeted*



Selama lima tahun (2020–2024), kinerja BBPOM Makassar dalam mengawasi mutu dan keamanan obat menunjukkan konsistensi yang positif, meskipun terjadi penurunan capaian pada tahun 2024. Penurunan pada 2024 menjadi sinyal penting untuk melakukan review terhadap strategi pengawasan, sumber daya, dan dukungan kebijakan. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 tidak mencapai target dengan kategori Cukup. Dari 428 sampel obat *targeted* yang disampling terdapat 48 sampel Tidak Memenuhi Syarat Uji. Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

IKSK. 1 4 : Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil

pengawasan



Terdapat tren peningkatan yang konsisten dari 2021–2023. Tahun 2024 Target dinaikkan dari 80 ke 95,5, dengan realisasi 96,32 sehingga capaian kategori Sangat baik (100,86%), meski sedikit menurun dibanding dua tahun sebelumnya. Tahun 2024 meskipun target dinaikkan, realisasi masih mampu menyesuaikan, yang mencerminkan kapasitas kelembagaan yang sudah matang dalam pengawasan makanan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), capaian kinerja terhadap indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan tren yang positif dan progresif, baik dari sisi pencapaian target maupun perbaikan kualitas hasil pengawasan.

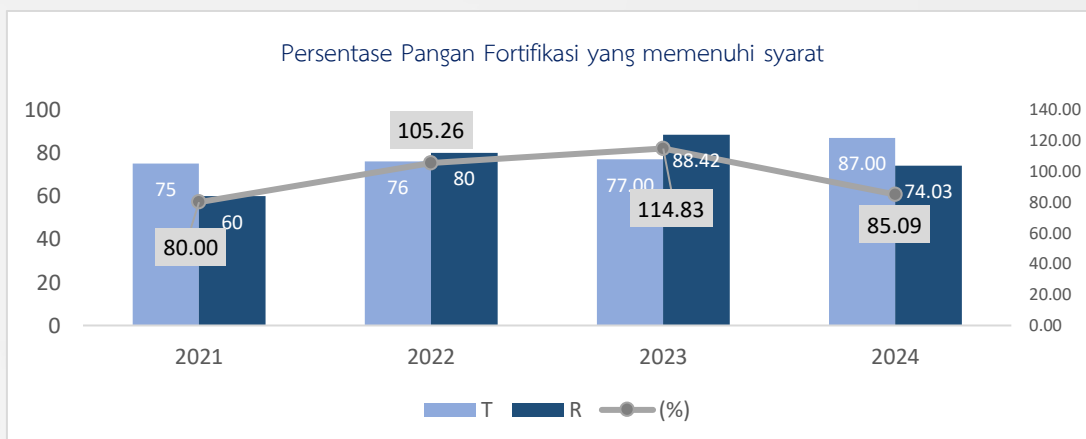
Pada tahun 2020, capaian berada pada angka 99,26%, sedikit di bawah target yang ditetapkan (78%), dengan realisasi sebesar 77,42%. Ini menunjukkan bahwa meskipun nyaris memenuhi target, efektivitas pengawasan masih dapat ditingkatkan. Namun demikian, capaian mendekati 100% ini menjadi dasar yang cukup baik untuk melakukan evaluasi dan penguatan strategi pengawasan di tahun berikutnya. Tahun 2021, terjadi perbaikan awal yang signifikan. Meskipun target sedikit diturunkan menjadi 77%, realisasi meningkat menjadi 79,02%, sehingga capaian naik menjadi 102,62%. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas program pengawasan dan kemungkinan adanya perbaikan pada metode pelaksanaan serta keterlibatan lintas sektor yang lebih aktif. Tahun 2022 menjadi titik balik yang sangat penting dengan lonjakan capaian hingga 118,18%. Dengan target tetap sebesar 78%, realisasi meningkat tajam menjadi 92,18%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya lompatan kualitas dalam sistem pengawasan, baik dari segi intensitas, ketepatan sasaran, maupun dukungan sumber daya. Capaian ini menandai hasil dari langkah-langkah penguatan pengawasan yang dirancang secara terstruktur dan sistematis, termasuk optimalisasi koordinasi antarunit teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan. Pada tahun 2023 capaian meningkat lebih tinggi lagi menjadi 119,31% dengan target yang sudah dinaikkan menjadi 80%.

Realisasi pengawasan mencapai 95,45%, menunjukkan adanya konsistensi pelaksanaan program pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa BBPOM Makassar telah mampu menjalankan fungsinya secara optimal melalui pendekatan yang terintegrasi dan berbasis risiko.

Tahun 2024 menandai fase *stabilisasi capaian* di mana target dinaikkan secara signifikan menjadi 95,50%, mencerminkan peningkatan ekspektasi organisasi atas kinerjanya sendiri. Realisasi kinerja tetap berhasil melampaui target, yaitu sebesar 96,32%, dengan capaian 100,86%. Walaupun capaian prosentase terlihat menurun jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, hal ini bukan indikasi penurunan kinerja, melainkan cerminan dari peningkatan standar yang lebih tinggi. BBPOM di Makassar menunjukkan kemampuannya untuk tetap menjaga mutu pengawasan di tengah tuntutan capaian yang semakin ketat.

Secara umum, kinerja pengawasan makanan BBPOM selama lima tahun terakhir menunjukkan arah yang sangat positif dan terkendali. Kenaikan nilai capaian dari tahun ke tahun mencerminkan adanya perbaikan tata kelola, strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan makanan yang aman dan bermutu di masyarakat.

IKSK. 5 : Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat



Indikator Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat merupakan indikator baru pada tahun 2021. Pengukuran terhadap indikator persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat didasarkan pada kerangka sampling dengan beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Capaian indikator menunjukkan tren meningkat dari 2021 hingga 2023, tetapi mengalami penurunan pada 2024.

Perbandingan realisasi capaian kinerja indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di BBPOM Makassar Tidak tersedia data

target maupun realisasi di Tahun 2020; Tahun 2021 Kategori *Cukup* dengan realisasi hanya 60 dari target 75 (80%); Tahun 2022 Mengalami peningkatan signifikan, kategori *Sangat Baik* dengan realisasi 80 dari target 76 (105,26%); Tahun 2023 Capaian terbaik dalam periode Renstra 2020-2024, dengan realisasi 88,42 dari target 77 (114,83%) kategori *Sangat Baik*; namun di Tahun 2024 terjadi penurunan ke kategori *Cukup* dengan capaian 85,09%, realisasi 74,03 dari target yang lebih tinggi yaitu 87. Tidak tercapainya Target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat karena terdapat 20 sampel fortifikasi garam yang Tidak Memenuhi Syarat

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat kategori “Cukup” antara lain : Sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2024, sampling pangan fortifikasi di peredaran untuk pemilihan tempat sampling kabupaten/kota dilakukan secara acak sesuai daftar kabupaten/kota dari ditentukan oleh pusat; Pelaksanaan pengujian sampel fortifikasi; Terjadinya kelangkaan Fortifikan KIO3 di peredaran; Tidak Terdapat penambahan sampel uji Fortifikan.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

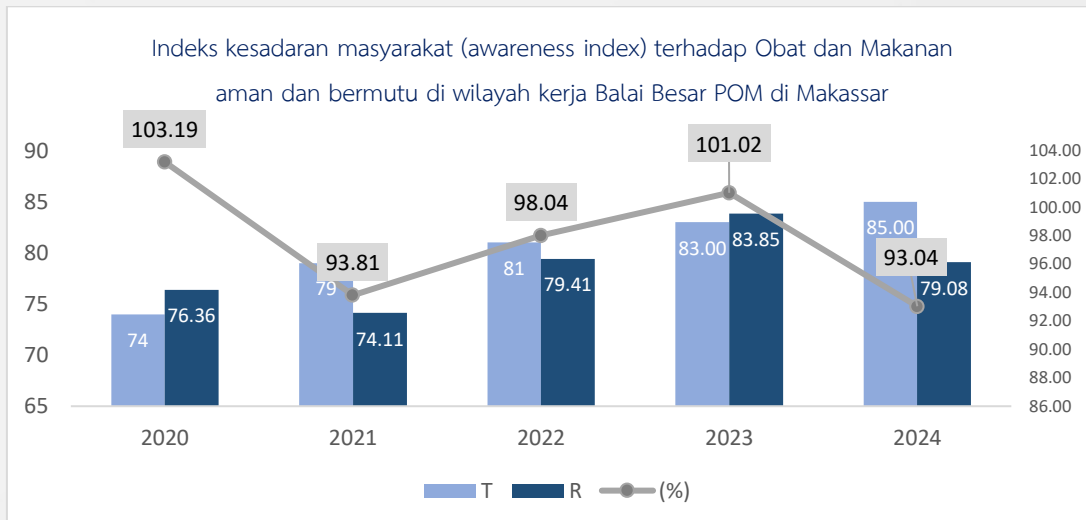
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar.

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan dipasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar memiliki tren NPS yang fluktuatif, Selama lima tahun terakhir (2020–2024), capaian sasaran kegiatan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Makassar menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada awal tahun 2020, capaian sangat tinggi (103,19%), mencerminkan keberhasilan strategi edukasi yang intensif, terutama dalam konteks darurat kesehatan masyarakat. Namun, capaian ini tidak konsisten. Tahun 2021 mengalami penurunan tajam ke angka 93,81%, sebagai dampak pembatasan aktivitas langsung di masyarakat akibat pandemi. Meski demikian, tren menunjukkan pemulihan di tahun 2022 (98,04%) dan kembali mencapai hasil optimal di 2023 (101,02%). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi edukasi publik dan pendekatan kolaboratif lintas sektor telah memberikan dampak yang positif. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian kembali ke angka 93,04%, mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesadaran masyarakat perlu ditinjau kembali dan diperkuat. Penurunan ini bisa

mencerminkan kejenuhan pendekatan yang digunakan, minimnya inovasi dalam penyampaian pesan, atau kurangnya keberlanjutan program edukatif yang berbasis komunitas.

IKSK. 2.1 : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar



Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 secara nasional didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 92,85 (Kategori Sangat Baik); nilai sikap masyarakat adalah 90,46 (Kategori Sangat Baik) dan nilai perilaku masyarakat adalah 80,97 (Kategori Baik).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Hasil pengukuran indeks per komoditi adalah 1) Obat 90,44 2) Obat Tradisional 86,80; 3) Suplemen Kesehatan 86,04; 4). Kosmetik 87,29; dan 5) Pangan Olahan 88,59. Indeks kesadaran masyarakat per komoditi seluruhnya berada pada kategori Baik dengan total realisasi Nasional dari target 85 , realisasi adalah 88,09.

Dari survey diketahui bahwa :

- pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE.
- Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk.
- Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah:

1. pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
2. Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa.
3. sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu pengetahuan masyarakat 89,32 selanjutnya sikap masyarakat 88,16 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,51.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain adalah :

Melakukan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dan penyebarluasan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial, media elektronik, media cetak, media luar ruang, dll. Upaya penyebarluasan informasi ini juga melibatkan lintas sektor maupun komunitas komunitas yang telah dibentuk oleh BBPOM Makassar misalnya kader keamanan pangan desa, kader sekolah, ibu ibu PKK, Karang Taruna, komunitas berbasis agama misalnya Muslimat, Fatayat, Salimah, dll. BBPOM Makassar juga menjalin kerjasama dengan Pramuka dengan melibatkan anggota pramuka pada kegiatan penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat. BBPOM Makassar juga telah membentuk kepengurusan SAKA POM yang melibatkan Kwarda Sulawesi Selatan. Selain itu BBPOM Makassar bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI melakukan KIE secara langsung kepada masyarakat dengan berbagai tema misalnya Keamanan Pangan, Pilih kosmetik aman sesuai kebutuhan, Obat Tradisional Warisan Budaya untuk menjaga kesehatan, dll.

3. Sasaran Kegiatan (SK 3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar

Pada Sasaran Strategis III Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar.

Capaian sasaran kegiatan peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di BBPOM

Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan positif, dengan capaian selalu berada di atas 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini merupakan indikator keberhasilan kelembagaan dalam membangun hubungan kepercayaan dan kepuasan stakeholder terhadap fungsi pengawasan publik.

Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 (104,94%), yang bisa dimaknai sebagai hasil dari proses perbaikan layanan pengawasan, edukasi, dan respons cepat terhadap pengaduan atau isu keamanan pangan dan obat. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan BBPOM Makassar dalam menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat pasca-pandemi.

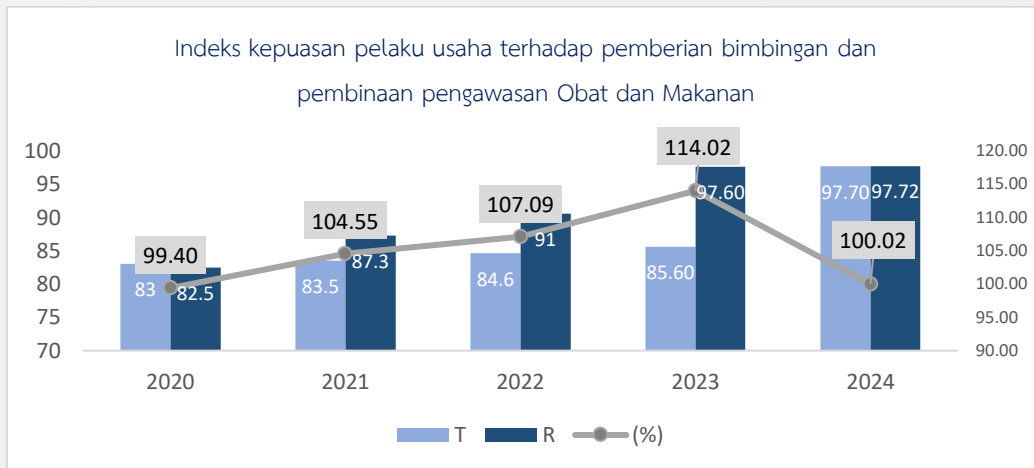
Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 100,18%, namun ini tetap dalam kategori baik. Penurunan ini bisa dijadikan titik awal untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi risiko, kanal pengaduan, dan mekanisme kolaborasi dengan pelaku usaha. Dengan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat, perlu ada inovasi dan penyegaran pendekatan layanan publik, agar tren positif dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Berbagai upaya yang dilakukan antara lain adalah BBPOM Makassar menyelenggarakan 9 jenis layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan berusaha. Semua aspek yang dipersyaratkan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan berusaha dipenuhi oleh pengaduan, dll telah dilengkapi oleh BBPOM Makassar. Upaya yang dilakukan BBPOM Makassar ini telah diapresiasi oleh berbagai pihak.

Namun demikian, BBPOM Makassar tetap menerima pengaduan dari masyarakat yang melaporkan berbagai kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat penerima layanan. Semua pengaduan tersebut diterima dengan baik, ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan BBPOM Makassar ke depan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selama tahun 2020 sampai 2024 semua pengaduan yang diterima telah selesai ditindaklanjuti dan hasilnya disampaikan kepada pelapor/pengadu. Dari survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap tahun, BBPOM Makassar mendapatkan gambaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kelemahan kelemahan pelayannya publik selama ini. Hasil SKM tersebut harus ditindaklanjuti dan dibuatkan rencana aksinya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Sasaran Kegiatan ini diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut : (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan; (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar.

IKSK. 3.1 : Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan



Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan Balai Besar POM di Makassar kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (regulatory assistance). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Balai Besar POM di Makassar dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Terdapat tren peningkatan signifikan dalam kepuasan pelaku usaha selama lima tahun terakhir. Sejak 2021, seluruh capaian berada dalam kategori Sangat Baik, mencerminkan efektivitas dan kualitas bimbingan/pembinaan yang terus meningkat. Tahun 2024 menjadi tahun stabilisasi pada standar tinggi, dengan target yang berhasil dipenuhi dengan tepat.

Tahun 2023 menjadi Puncak Kinerja, Realisasi 97,60 dengan target 85,6 menghasilkan capaian tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu 114,02%. Pencapaian ini menandakan kepercayaan pelaku usaha terhadap pengawasan dan pembinaan semakin tinggi. Tahun 2024 merupakan Target Tinggi. Target tahun ini dinaikkan secara signifikan menjadi 97,70. serta Realisasi 97,72, sangat presisi, dengan capaian 100,02%.

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BBPOM Makassar dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

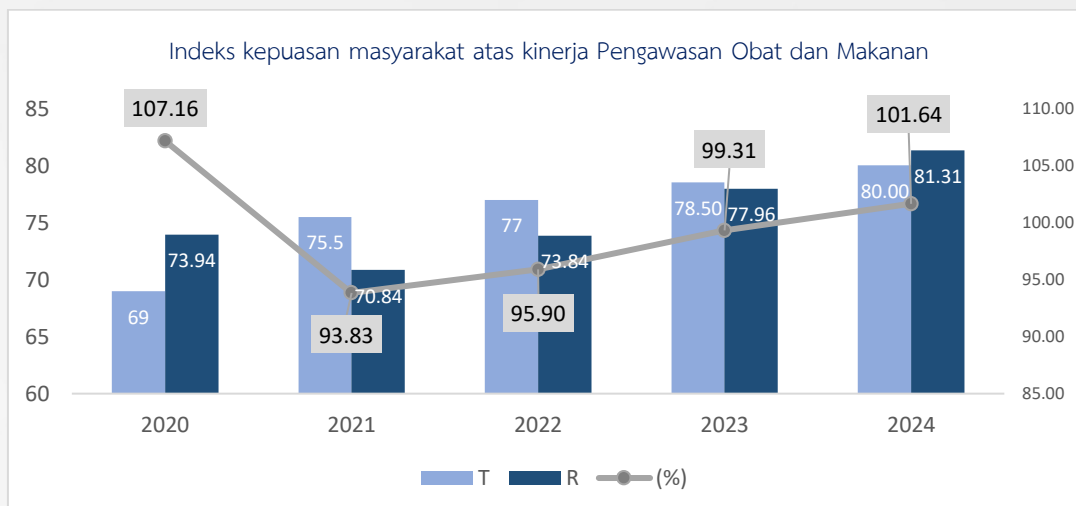
BBPOM di Makassar selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima. Terhadap pelaku usaha yang diberikan layanan dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi, berupa kegiatan pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi, dan telah dibuatkan inovasi yang menunjang pelayanan publik serta meningkatkan ekspektasi dari pelaku usaha. Untuk Tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik.

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks

kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori Sangat Baik antara lain :

- melakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading yang rendah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha yang berisiko.
- BBPOM di Makassar tetap melakukan Kegiatan bimbingan dan pembinaan sampai dengan triwulan ke IV meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Pedang Puang Baso' yaitu pendampingan UMK Pangan Olahan.
- Pendampingan UMKM obat tradisional yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT, *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Pendampingan bagi UMKM kosmetik juga telah dilakukan melalui inovasi Pedang Puang Basok dengan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Untuk mendukung percepatan penerbitan ijin edar maka Balai Besar POM di Makassar bekerja sama dengan Direktorat Pangan Olahan Badan POM menyelenggarakan *Desk Registrasi* Pangan Olahan. Kegiatan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.

IKSK. 3.2 : Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan



Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu **Reliability**, **Assurance**, **Responsiveness** dan **Empathy**.

IKSK 3.2 Indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan” menunjukkan **dinamika yang mencerminkan adaptasi kelembagaan terhadap berbagai tantangan eksternal dan ekspektasi publik** selama lima tahun terakhir (2020–2024). Tahun 2020 merupakan capaian tertinggi (107,16%) dalam yang sangat mungkin didorong oleh situasi darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Respons cepat, kehadiran aktif, serta layanan pengawasan yang dianggap sangat relevan menjadi faktor utama peningkatan kepuasan masyarakat.

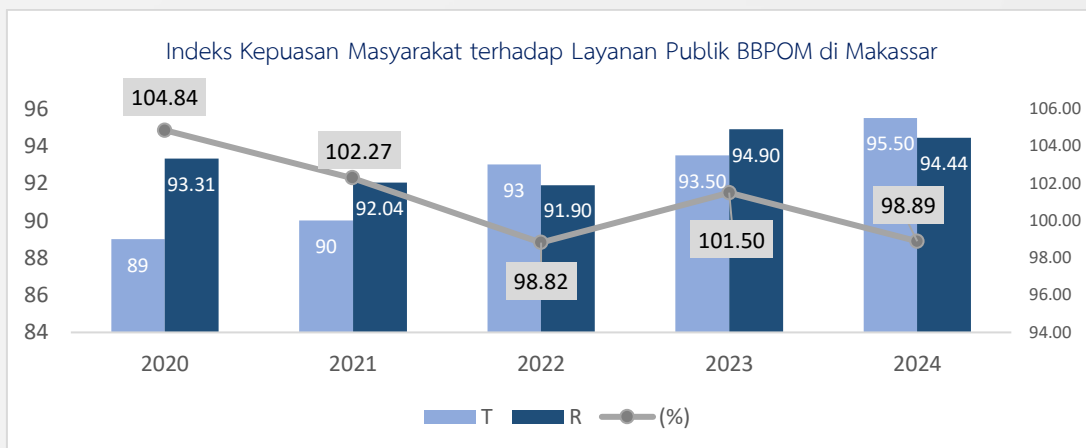
Namun demikian, tahun 2021 menjadi titik penurunan yang signifikan. Target dinaikkan cukup drastis, tetapi capaian menurun pada angka 93,83%. Hal ini menjadi cerminan bahwa meningkatnya ekspektasi tidak diimbangi dengan kesiapan sistem layanan publik yang optimal, terutama dalam konteks keterbatasan aktivitas fisik. Tren positif mulai terlihat kembali pada tahun 2022 dan 2023, ketika capaian kembali mendekati target. Peningkatan capaian ini mengindikasikan bahwa BBPOM Makassar telah melakukan perbaikan-perbaikan signifikan pada sistem layanan, transparansi, dan pengawasan publik. Tahun 2024 menjadi tonggak keberhasilan dengan capaian di atas 100% (101,64%). Hal ini menunjukkan keberhasilan lembaga dalam mengelola ekspektasi masyarakat, menyediakan layanan yang responsif, dan memperkuat kredibilitas pengawasan di mata publik.

Pada tahun 2024, target indeks Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan meningkat dari 78,5 (tahun 2023) menjadi 80,0. Realisasi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 77,96 menjadi 81,31. Ini mencerminkan tidak hanya peningkatan ekspektasi terhadap kinerja pengawasan, tetapi juga kemampuan BBPOM di Makassar dalam memenuhi bahkan melebihi target; Perubahan dari kategori "Cukup" pada 2023 ke "Sangat Baik" pada 2024 menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pengawasan obat dan makanan. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan kualitas komunikasi risiko, pelayanan yang lebih cepat, serta responsif terhadap keluhan publik.

- a. Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM terhadap Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan :
 - Kepuasan terhadap upaya pengawasan BPOM
 - Kepuasan terhadap tindakan BPOM
 - Kepuasan terhadap kemampuan BPOM melindungi masyarakat
 - Kepuasan terhadap perhatiannya BPOM atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM berdasarkan 5 (lima) komoditi
 - Obat dengan nilai sebesar 81,63 kategori Puas.
 - Obat Tradisional dengan nilai sebesar 81,19 kategori Puas.
 - Suplemen Kesehatan dengan nilai sebesar 81,25 kategori Puas.
 - Kosmetik dengan nilai sebesar 80,83 kategori Puas.
 - Pangan Olahan dengan nilai sebesar 81,16 Puas.

IKSK. 3.3 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai

Besar POM di Makassar



Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM kategori “Cukup” antara lain: Berdasarkan evaluasi Mandiri BBPOM di Makassar Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2024 adalah 94,44%. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik diukur berdasarkan 9 unsur pelayanan terhadap 9 jenis layanan publik BBPOM di Makassar.

- Tahun 2024, layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BBPOM Makassar dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan.
- Pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Makassar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik nilai SKM 94,40. Nilai SKM BBPOM di Makassar, menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mutu sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian dan Biaya/Tarif.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana, Kompetensi Pelaksana dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

4. Sasaran Kegiatan (SK 4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan,

khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Selama periode 2020–2024, sasaran kegiatan “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik” menunjukkan kinerja yang sangat baik dan relatif stabil, dengan capaian **selalu mendekati atau di atas 100%**.

Puncak capaian terjadi pada tahun 2021 (110,04%), yang merefleksikan keberhasilan BBPOM Makassar dalam mengadopsi strategi pengawasan dan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah pandemi. Peningkatan ini juga didukung oleh optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan, terutama pada 2023 yang hampir menyentuh batas bawah capaian target. Meskipun penurunannya tidak signifikan, hal ini mengindikasikan perlunya konsolidasi sistem dan peningkatan efisiensi kerja di lapangan. Namun demikian, tahun 2024 menandai fase pemulihan dengan capaian 102,14%, mengindikasikan bahwa langkah-langkah korektif yang diambil membuahkan hasil. Secara umum, BBPOM Makassar telah berhasil mempertahankan kinerja pengawasan dan pelayanan publik yang efektif dan adaptif, sekaligus menunjukkan kemampuan mengelola perubahan serta tantangan teknis maupun administratif di lapangan.

Pada Sasaran Kegiatan 4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, (6) Indeks Pelayanan Publik, (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

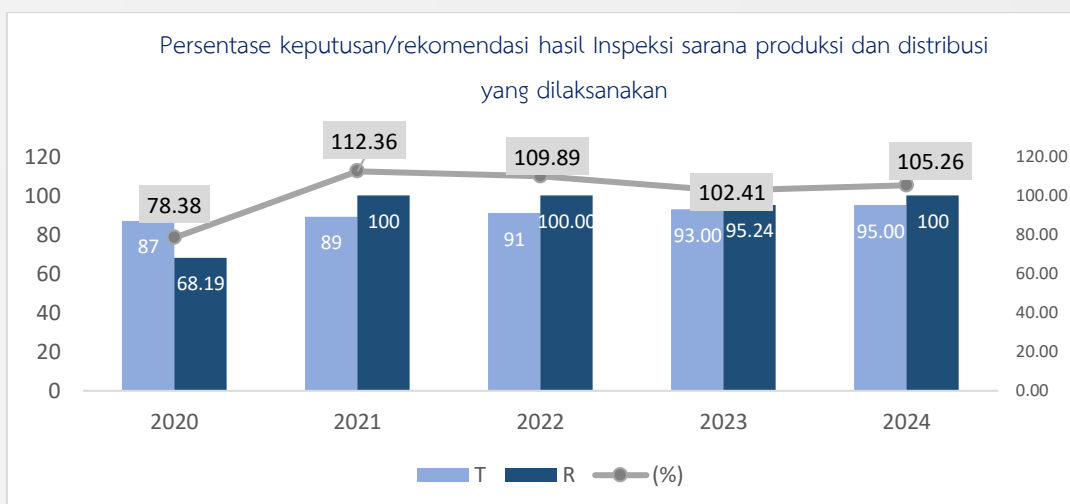
Selama lima tahun terakhir, Balai Besar POM di Makassar telah menunjukkan kinerja yang solid, konsisten, dan berorientasi pada hasil nyata dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta pelayanan publik. Capaian indikator-indikator dalam sasaran kegiatan ini secara umum mengalami peningkatan dan stabilitas yang menggambarkan efektivitas tata kelola, profesionalisme pengawasan, serta responsivitas BBPOM di Makassar terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Capaian rata-rata indikator dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa BBPOM Makassar tidak hanya mampu memenuhi target nasional yang

ditetapkan, tetapi juga terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama melampaui ekspektasi kinerja. Hal ini mencerminkan implementasi kebijakan pengawasan yang adaptif, dukungan infrastruktur kerja yang mumpuni, serta komitmen sumber daya manusia yang konsisten dalam menjaga mutu pelaksanaan tugas.

Peningkatan efektivitas pengawasan tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya capaian dalam pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi, tetapi juga semakin baiknya tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik dalam aspek produksi maupun distribusi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan BBPOM di Makassar baik berbasis risiko, edukatif, maupun berbasis kemitraan telah memberikan dampak sistemik dalam memperbaiki ekosistem mutu obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar.

IKSK. 4.1 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

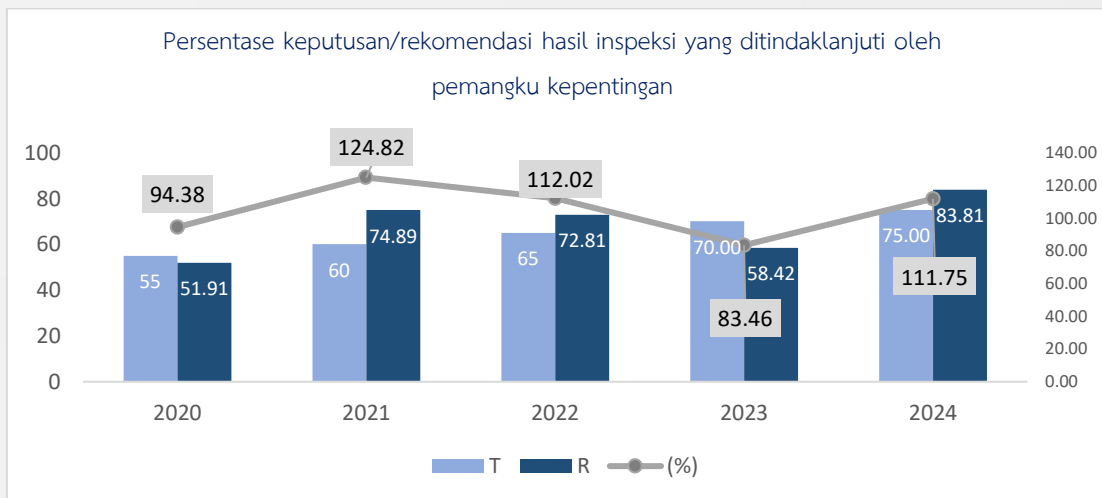


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana obat dan makanan (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID, termasuk kepada Badan POM dalam rangka verifikasi), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Indikator ini merupakan cerminan langsung dari komitmen organisasi dalam melaksanakan hasil rekomendasi dari kegiatan inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Selama periode 2020–2024, tren capaian menunjukkan pola perbaikan kinerja yang sangat signifikan dan konsisten. Tahun 2020 sebagai titik awal menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan inspeksi akibat faktor eksternal (pandemi), dengan capaian jauh di bawah target. Namun BBPOM di Makassar mampu melakukan perbaikan menyeluruh di tahun-tahun berikutnya, dibuktikan dengan capaian yang terus meningkat hingga melewati 100% selama empat Tahun 2021 - 2024.

Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan proses internal, seperti: Perencanaan inspeksi berbasis risiko; Penyusunan rekomendasi yang lebih aplikatif; Optimalisasi koordinasi dengan pihak sarana dan stakeholder terkait; Serta digitalisasi atau sistem pelaporan yang mempercepat proses tindak lanjut.

Tahun 2023 menunjukkan penurunan sedikit, namun tidak mengganggu tren capaian positif. Tahun 2024 berhasil menunjukkan konsistensi dengan realisasi 100% dan capaian 105,26%, sekaligus mengindikasikan bahwa BBPOM di Makassar mampu menjawab ekspektasi yang terus meningkat dari sisi target kerja.

IKSK. 4.2 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

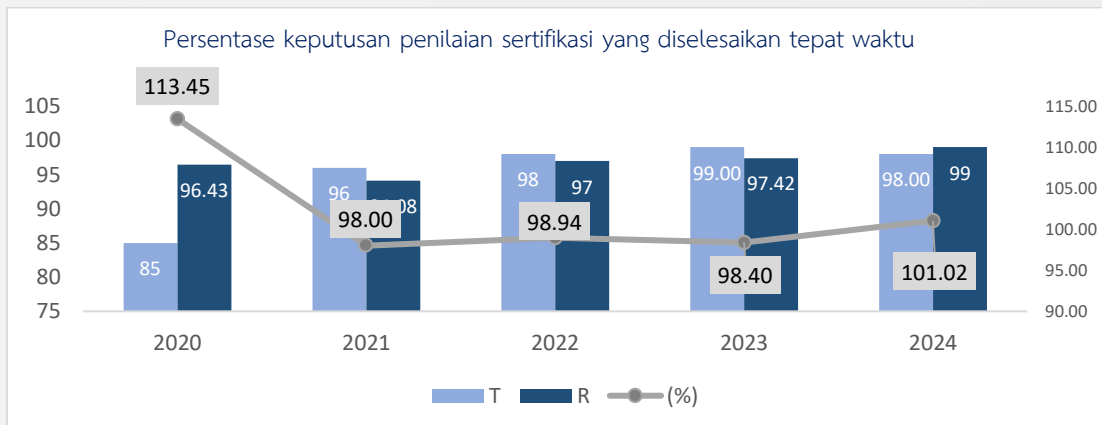


Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Makassar kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: pelaku usaha dan lintas sektor (Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Indikator ini menggambarkan efektivitas pengaruh BBPOM di Makassar terhadap tindak lanjut hasil inspeksi oleh pemangku kepentingan, yang menjadi bagian penting dari keberhasilan siklus pengawasan. Selama lima tahun terakhir, capaian indikator ini menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara keseluruhan tetap positif.

Setelah awal yang moderat di 2020, capaian meningkat tajam dan konsisten tinggi pada 2021–2022, menunjukkan adanya sistem dan komunikasi yang solid. Penurunan drastis pada 2023 menjadi perhatian penting, karena menunjukkan potensi lemahnya pengawasan pasca-inspeksi di level mitra kerja eksternal. Namun, pemulihan di tahun 2024 menjadi bukti bahwa BBPOM Makassar memiliki kapasitas kelembagaan yang adaptif, mampu merespons tantangan koordinasi dan mengembalikan kinerja ke arah positif.

IKSK. 4.3 : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



BBPOM di Makassar melakukan evaluasi penilaian sertifikasi meliputi pelayanan terkait rekomendasi/sertifikasi CPPOB, CPOTB, dan CDOB, Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Impor, Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ekspor dan Pelayanan Pengujian Sampel.

Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menggambarkan efisiensi dan profesionalisme dalam menyelesaikan proses penilaian sertifikasi, yang menjadi bagian penting dari pelayanan publik dan pengawasan mutu di BBPOM Makassar. Selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), capaian indikator ini selalu berada di atas 98%, dengan satu tahun (2020) jauh melampaui target (113,45%) dan tahun 2024 kembali melampaui 100%.

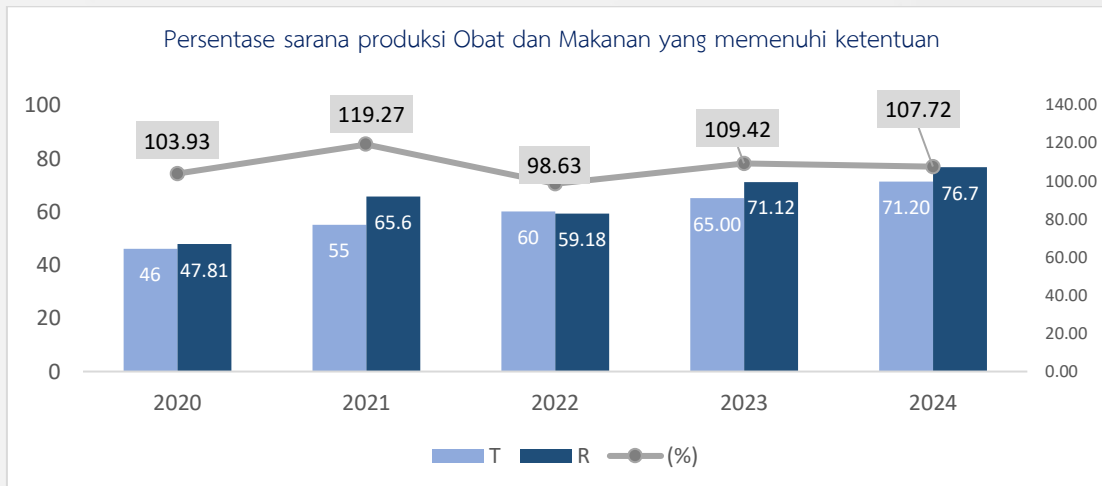
Capaian ini menjadi bukti bahwa BBPOM Makassar memiliki sistem yang terstandarisasi, personel yang kompeten, dan manajemen waktu kerja yang efektif dalam penyelesaian keputusan sertifikasi. Konsistensi yang tinggi juga menandakan bahwa proses ini sudah berjalan secara sistemik, tidak tergantung pada faktor insidental.

Penurunan kecil pada 2021–2023 tidak menunjukkan kegagalan, melainkan bagian dari penyesuaian terhadap kenaikan target yang cukup signifikan, dan tetap mampu dipenuhi secara hampir sempurna. Secara keseluruhan, indikator ini adalah salah satu indikator paling stabil dan konsisten tinggi di antara seluruh indikator kinerja BBPOM Makassar.

IKSK. 4.4 : Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan merupakan bentuk kepatuhan para pelaku usaha di bidang produksi Obat dan Makanan. Sarana produksi yang dimaksud adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus seperti unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca, dan instalasi farmasi rumah sakit), sarana produksi Obat Tradisional (Industri Obat Tradisional (IOT), (Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). sarana produksi Kosmetik (Industri Kosmetik golongan A dan B), sarana produksi Suplemen Kesehatan (mencakup IOT, UKOT

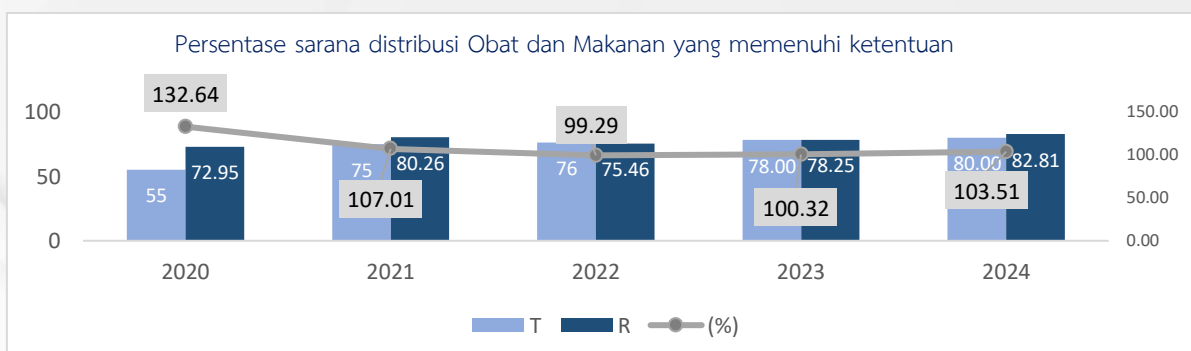
(GMP), Industri Farmasi (Fasber), dan Industri Pangan), dan sarana produksi pangan (sarana produksi MD dan IRTP/UMKM). Namun, tidak seluruh jenis sarana produksi tersebut berada di wilayah kerja BBPOM di Makassar, sarana produksi yang berada di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sarana produksi pangan olahan (sarana produksi MD dan IRTP/UMKM) dan sarana produksi obat tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).



Indikator ini mencerminkan kualitas dan kepatuhan sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tren capaian selama lima tahun menunjukkan performa yang sangat baik dan stabil, dengan empat dari lima tahun capaian berada di atas 100%.

Tahun 2021 merupakan capaian tertinggi (119,27%), yang dapat dikaitkan dengan peningkatan intensitas pembinaan teknis, adaptasi sarana terhadap regulasi baru, serta dukungan dari pengawasan yang lebih menyeluruh. Penurunan pada tahun 2022 tidak bersifat struktural karena segera diikuti oleh pemulihan yang kuat di 2023 dan konsistensi pada 2024. Capaian tahun 2024 (107,72%) menunjukkan bahwa program pengawasan dan pembinaan BBPOM terhadap sarana produksi sudah memasuki fase yang terstruktur dan berkelanjutan, mencerminkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah menyesuaikan diri terhadap sistem mutu yang diharapkan.

IKSK. 4.5 : Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

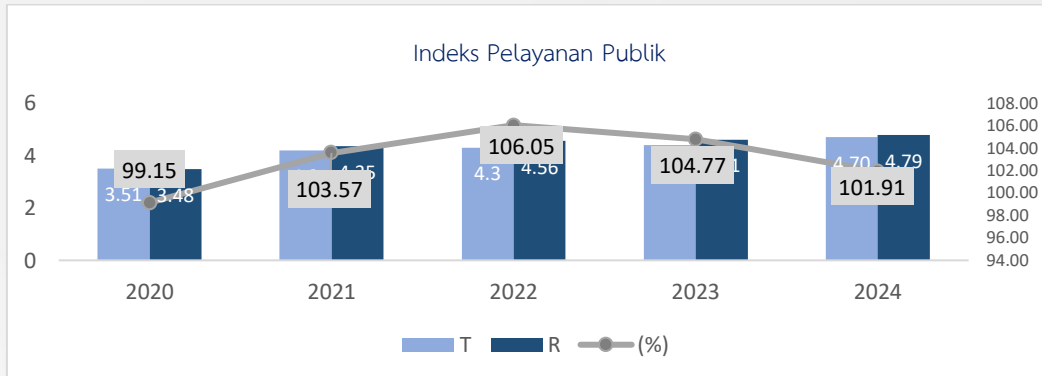


Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan merupakan kepatuhan pelaku usaha di bidang distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Perhitungan dilakukan terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat (Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Provinsi/Kota/Kabupaten, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, serta Klinik), sarana distribusi Obat Tradisional, sarana distribusi Suplemen Kesehatan, sarana distribusi Kosmetik, dan sarana peredaran pangan olahan.

Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan sarana distribusi obat dan makanan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, yang sangat penting dalam menjaga keamanan, mutu, dan kelayakan produk sebelum sampai ke konsumen.

Selama lima tahun terakhir, BBPOM di Makassar secara konsisten menunjukkan performa sangat baik terhadap indikator ini, dengan capaian selalu mendekati atau melampaui target nasional. Tahun 2020 menjadi tahun capaian tertinggi (132,64%) yang mencerminkan dampak dari pengawasan ketat selama masa krisis kesehatan. Meski sempat turun di 2022, capaian tersebut masih kategori “Cukup” (99,29%) dan kembali menguat pada 2023–2024. Stabilitas kinerja ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik di sektor distribusi, serta keefektifan metode pengawasan, pembinaan regulatif, dan pelaksanaan inspeksi rutin oleh BBPOM di Makassar.

IKSK. 4.6 : Indeks Pelayanan Publik



Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menggunakan 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalisme SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%).

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator penting untuk menilai persepsi dan pengalaman masyarakat serta pelaku usaha terhadap layanan

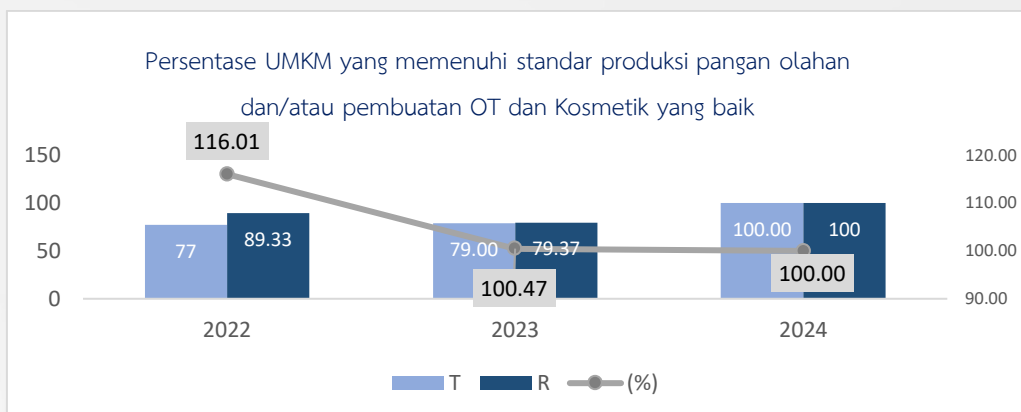
yang diberikan oleh BBPOM di Makassar. Tahun 2020–2024, kinerja BBPOM di Makassar pada indikator ini menunjukkan tren yang sangat positif dan stabil, dengan seluruh capaian berada mendekati atau di atas target nasional.

Peningkatan signifikan dimulai sejak tahun 2021, yang menunjukkan keberhasilan lembaga dalam melakukan transformasi layanan pasca-pandemi, termasuk penerapan digitalisasi, percepatan layanan administratif, peningkatan kualitas interaksi front-office, serta penguatan saluran pengaduan dan transparansi prosedur.

Tahun 2022 menjadi puncak kinerja, dan keberhasilan tersebut terus dipertahankan hingga 2024, meskipun standar target terus meningkat. Ini menjadi bukti nyata bahwa BBPOM di Makassar tidak hanya mampu menjaga kualitas layanan, tetapi juga mengelola ekspektasi publik secara tepat dan terus berinovasi.

Keberhasilan ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Makassar, diantaranya : Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik, digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses, Pendampingan UMKM dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan serta Pelaksanaan inovasi pelayanan publik secara konsisten (SEPPULO, MOLKIKA PLUS (MANTAPPOL) dan PEDANG PUANG BASOK)

IKSK. 4.7 : Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 sd 2023, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena merupakan indikator baru. Sedangkan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 79,37 dengan capaian 100,47 % kategori “Sangat Baik” lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 89,33 capaian 116,01 % kategori “Sangat Baik”.

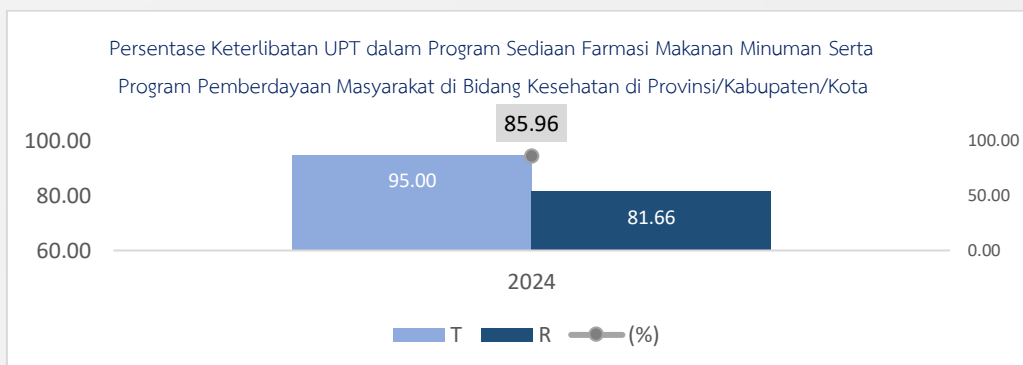
Realisasi tahun 2024 sebesar 100 dengan capaian 100 % kategori “Baik” lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 79,37 capaian 100,47 % kategori “Sangat Baik”.

Indikator ini mengukur keberhasilan BBPOM di Makassar dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi UMKM agar memenuhi standar

keamanan dan mutu produksi pangan olahan, obat tradisional, dan kosmetik sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun indikator ini baru mulai dilaporkan pada tahun 2022, capaian dari tahun pertama hingga 2024 menunjukkan tren yang sangat positif dan stabil.

Tahun 2022 menjadi tonggak awal dengan capaian 116,01%, menandakan keberhasilan strategi intervensi langsung, pelatihan teknis, serta pemberian asistensi dokumen kepada UMKM. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan stabilitas performa, bahkan di tengah peningkatan target yang signifikan. Capaian 100% pada 2024 menandakan bahwa BBPOM Makassar tidak hanya melakukan pembinaan yang luas, tetapi juga berhasil memastikan hasilnya nyata dan terstandar.

IKSK. 4.8 : Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota



Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

- 1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (LokaPOM).
- 2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - ii. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting

Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

- 3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota. i. Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

Tahun 2024 menjadi tahun pertama pengukuran indikator ini, dengan hasil capaian 85,96%, atau masih di bawah target 95,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi BBPOM di Makassar dalam program lintas sektor telah dimulai dan berjalan, namun masih terdapat ruang besar untuk penguatan kolaborasi, peningkatan intensitas keikutsertaan, dan integrasi peran dalam program-program daerah.

Penyebab belum tercapainya target antara lain:

- Belum efektifnya koordinasi strategis antara BBPOM di Makassar dan pemda/provinsi terkait peran lintas sektor,
- Keterbatasan SDM atau waktu yang tersedia untuk mengikuti berbagai program pemberdayaan di luar pengawasan teknis,
- Belum adanya sistem pemantauan dan pelaporan keterlibatan yang terstruktur dan terukur.

5. Sasaran Kegiatan (SK 5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

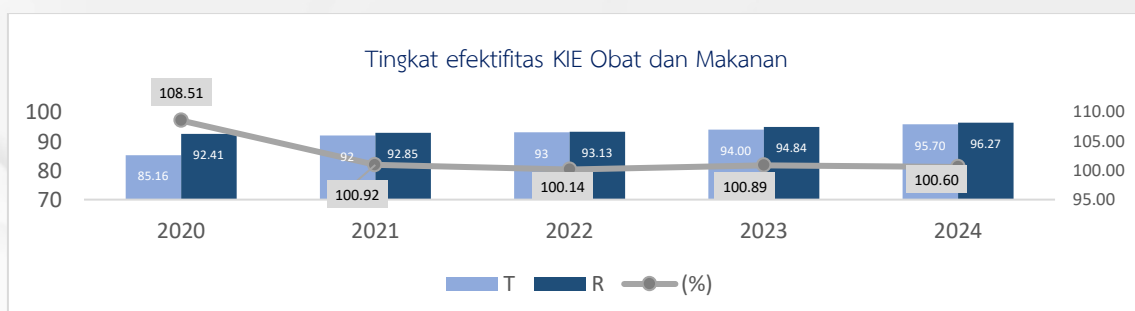
Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar dengan tren NPS naik sejak tahun 2021-2024 hal ini menunjukkan bahwa program komunikasi, informasi dan edukasi terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan telah efektif dan memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat dalam turut serta melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Pada Sasaran Strategis V Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas KIE obat dan makanan diantaranya :

- Menjalinkan kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk penyebaran informasi keamanan obat dan makanan. Pada jangka waktu 2020 s.d. 2024, BBPOM di Makassar telah berhasil menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk publikasi video keamanan obat dan makanan pada moda transportasi “Wira-wiri”. Selain itu, BBPOM di Makassar juga menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang untuk publikasi video keamanan obat dan makanan pada media videotron. Untuk meningkatkan partisipasi aktif pemerintah daerah, BBPOM di Makassar memberikan apresiasi atas dukungan publikasi keamanan obat dan makanan yang disampaikan langsung oleh Plt. Kepala BBPOM di Makassar.
- Dalam setiap kegiatan Desa, Pasar dan PJAS, BBPOM di Makassar mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika di masing-masing daerah yang diintervensi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan publikasi keamanan obat dan makanan, serta untuk tujuan peliputan kegiatan pro PN agar masyarakat lebih mengenal BPOM dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pro PN.
- Mengundang narasumber lokal dalam kegiatan penyebaran informasi, serta membuat materi informasi keamanan obat dan makanan yang disesuaikan dengan bahasa daerah agar lebih dimengerti. Misalnya untuk di daerah Kabupaten Maros, materi informasi dibuat dalam bahasa Bugis agar masyarakat dapat lebih memahami materi.

IKSK. 5.1 : Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan.

Indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren capaian yang sangat stabil dan progresif di atas 100%, menandakan keberhasilan Balai Besar POM di Makassar dalam:

- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat/pangan ilegal dan tidak memenuhi syarat,
- Meningkatkan literasi masyarakat terhadap label, komposisi, dan izin edar produk obat dan makanan,
- Menumbuhkan partisipasi aktif publik dalam pengawasan berbasis komunitas.

Kinerja ini juga menjadi refleksi atas efektivitas transformasi pendekatan KIE, dari konvensional menuju:

- Edukasi berbasis digital,
- Kampanye kolaboratif lintas sektor,
- Segmentasi audiens yang lebih spesifik (remaja, ibu rumah tangga, pelaku UMKM),
- Pelibatan media lokal dan tokoh komunitas sebagai agen edukasi.

IKSK. 5.2 : Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman



Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru dan pengelola kantin sekolah. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, Sosialisasi Keamanan PJAS, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi PJAS Aman.

Selama periode 2020–2024, indikator Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman menunjukkan kinerja luar biasa dengan capaian 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan:

- Peningkatan komitmen BBPOM di Makassar dalam menjamin pangan aman bagi anak sekolah.
- Sinergi efektif antar lintas sektor dalam membangun budaya keamanan pangan sejak usia dini.
- Perluasan program yang sistematis dengan strategi advokasi, pelatihan kader PJAS, serta penguatan peran komunitas sekolah.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah sekolah PJAS Aman, tetapi juga memberi efek jangka panjang terhadap pembentukan perilaku konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi generasi muda.

IKSK. 5.3 : Jumlah desa pangan aman



Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Pangan Aman adalah desa yang memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

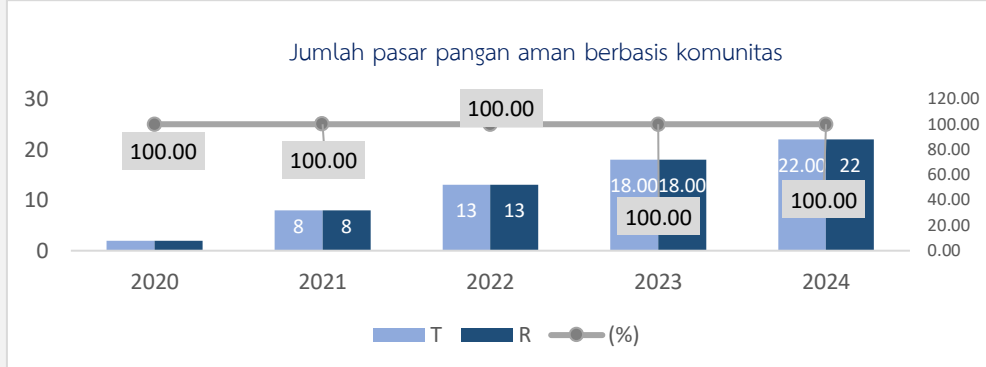
Selama periode lima tahun (2020–2024), indikator Jumlah Desa Pangan Aman menunjukkan kinerja optimal dengan capaian 100% secara konsisten. Ini mencerminkan keberhasilan Balai Besar POM di Makassar dalam mendorong program pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berbasis komunitas secara menyeluruh.

Peningkatan jumlah desa dari 4 desa (2020) menjadi 31 desa (2024) tidak hanya mencerminkan pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga menunjukkan:

- Kematangan strategi advokasi dan edukasi keamanan pangan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa.
- Keterlibatan aktif lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, kader pangan desa, dan kelompok masyarakat dalam menjaga standar keamanan pangan lokal.

Program Desa Pangan Aman berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, penguatan literasi pangan sehat, dan menciptakan lingkungan pangan berbasis risiko rendah di tingkat komunitas.

IKSK. 5.4 : Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar berhasil menunjukkan kinerja optimal selama lima tahun terakhir. Dimulai dari 2 pasar binaan di tahun 2020, hingga akhir tahun 2024 program ini menjadi 22 pasar. Konsistensi dalam pencapaian 100% menunjukkan adanya:

- Efektivitas kolaborasi antara BBPOM, pengelola pasar, dan komunitas pedagang.
- Peningkatan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha pangan dalam menjaga keamanan produk.
- Keberhasilan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dan edukasi intensif di titik distribusi.

Program ini tidak hanya meningkatkan keamanan pangan, tetapi juga menjadi role model pembinaan pangan aman berbasis risiko di lingkungan pasar tradisional, yang selama ini menjadi titik kritis dalam rantai pasok pangan masyarakat.

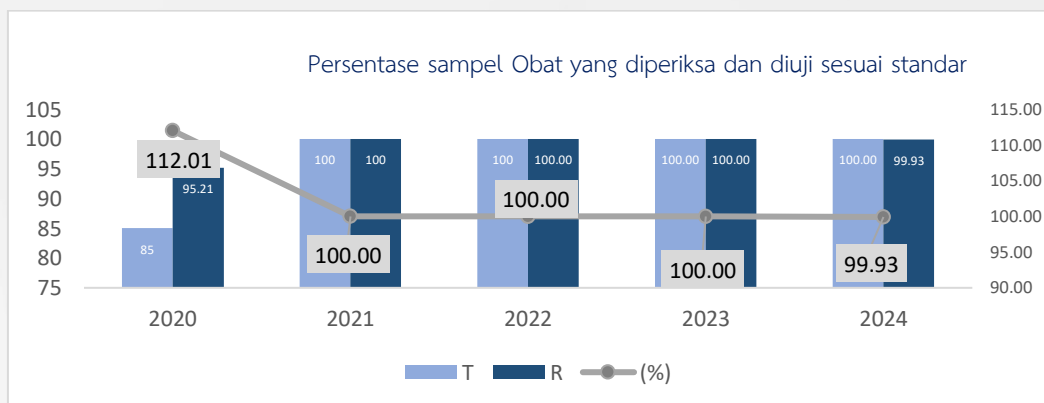
6. Sasaran Kegiatan (SK 6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar

Pada Sasaran Strategis VI Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, kedua indikator tersebut memperoleh capaian kinerja 100%, namun pada kenyataannya masih banyak beredar produk - produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Hal ini menjadi perhatian BPOM untuk dapat melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja di khususnya meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sampling adalah melalui pembelian dan pemilihan sampel sesuai pedoman sampling, serta penilaian penandaan sesuai ketentuan. Beberapa upaya yang dilakukan di laboratorium pengujian dalam rangka mengawal pencapaian target adalah perencanaan sampling dan pengujian dan melakukan monitoring, sehingga proses pengujian dapat berjalan lancar. Apabila kondisi peralatan dalam keadaan siap dan ketersediaan bahan habis pakai sudah lengkap, maka pengujian dapat dilakukan sesuai dengan standar ruang lingkup parameter uji dan timeline pengujian.

IKSK. 6.1 : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar merupakan parameter penting dalam menjamin mutu dan keamanan obat yang beredar di masyarakat. Kinerja BBPOM Makassar pada indikator ini selama lima tahun terakhir sangat mengesankan dan menunjukkan:

- Konsistensi pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang sesuai SOP.
- Kemampuan laboratorium yang andal dalam mendukung tugas pengawasan.
- Stabilitas sumber daya manusia dan peralatan pengujian.

Capaian sempurna selama tiga tahun berturut-turut (2021–2023) mencerminkan bahwa sistem monitoring dan quality control telah berjalan optimal, sedangkan realisasi 99,93% pada 2024 tetap menunjukkan tingkat

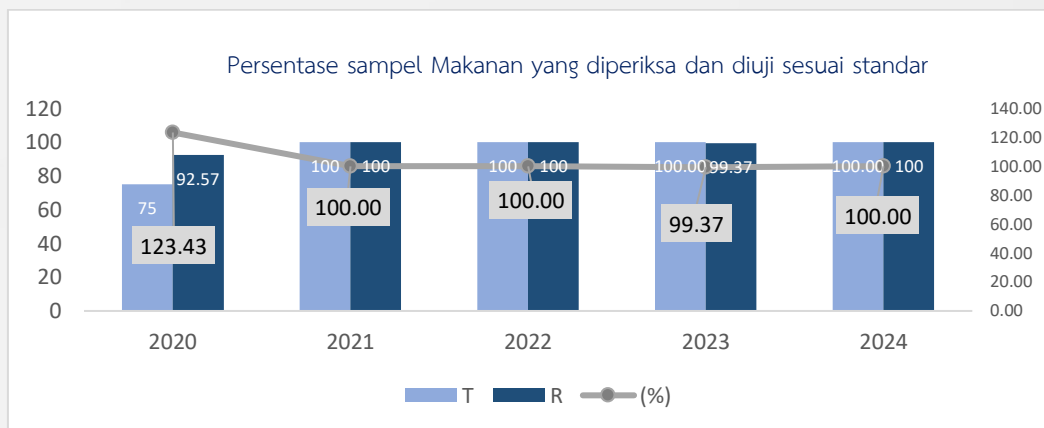
akurasi yang sangat tinggi.

Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan merupakan langkah preventif utama untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. BBPOM di Makassar telah menunjukkan performa optimal dan konsisten pada indikator ini. Seluruh target tahunan berhasil dipenuhi bahkan melampaui target di tahun awal (2020), menandakan adaptabilitas dan efektivitas sistem laboratorium.

Pencapaian ini mencerminkan:

- Peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM,
- Efektivitas koordinasi lintas unit kerja (pengambilan sampel hingga pelaporan hasil),
- Pengendalian mutu yang kuat dalam proses pengujian.

IKSK. 6.2 : Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sampel makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari Balai Besar POM di Makassar atau UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

Tahun 2020 menunjukkan Capaian Melampaui Target sebesar 123,43%, yang menandakan adanya peningkatan jumlah pemeriksaan sampel makanan, sebagai respons terhadap kebutuhan pengawasan ketat selama awal masa pandemi COVID-19. Tahun 2021–2024 Selama empat tahun berturut-turut, capaian berada pada atau mendekati 100%, mencerminkan kinerja yang stabil, akurat, dan dapat dipertahankan. Penurunan kecil di tahun 2023 = 99,37% masih dalam kategori Cukup.

Tidak terdapat penurunan kinerja yang mengkhawatirkan, sehingga tidak

diperlukan tindakan korektif besar. Namun, tetap perlu dilakukan penguatan proses dan monitoring kualitas.

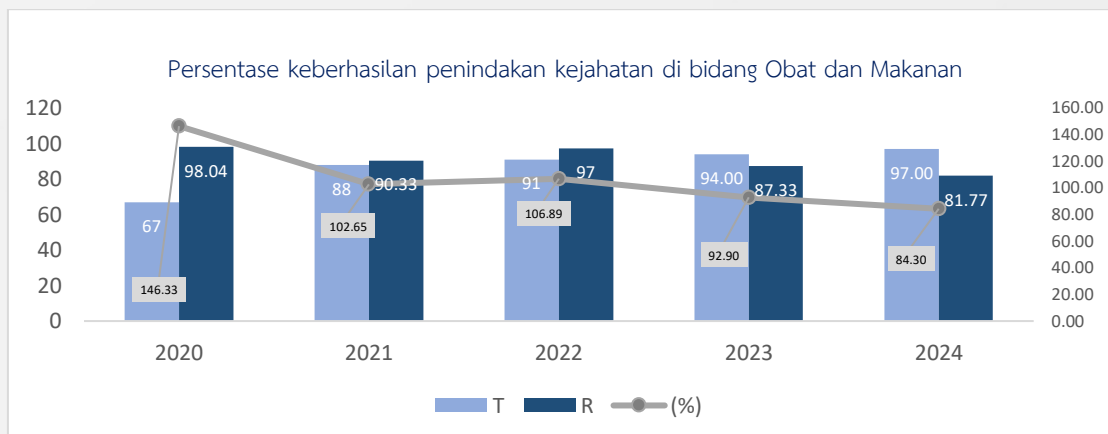
Pemeriksaan dan pengujian sampel makanan merupakan langkah preventif utama untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. BBPOM di Makassar telah menunjukkan performa optimal dan konsisten pada indikator ini. Seluruh target tahunan berhasil dipenuhi bahkan melampaui target di tahun awal (2020), menandakan adaptabilitas dan efektivitas sistem laboratorium.

Pencapaian ini mencerminkan:

- Peningkatan kapasitas laboratorium dan SDM,
- Efektivitas koordinasi lintas unit kerja (pengambilan sampel hingga pelaporan hasil),
- Pengendalian mutu yang kuat dalam proses pengujian.

7. Sasaran Kegiatan (SK 7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Makassar



Pada Sasaran Strategis VII Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Makassar, terdapat indikator yaitu (1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, perkara tindak pidana obat dan makanan yang ditangani PPNS Balai Besar POM di Makassar terlihat fluktuatif yaitu 9 perkara di tahun 2020, 9 perkara di tahun 2021, 10 perkara tahun 2022, 10 perkara tahun 2023 dan 10 perkara tahun 2024. Secara jumlah, penanganan perkara belum sebanding dengan kondisi banyaknya pelanggaran di lapangan, antara lain tergambar dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait peredaran OMKA ilegal.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui :

1. Koordinasi intensif dengan CJS/Criminal Justice System dalam penyelesaian pemberkasian dan stakeholder lainnya (BINDA, BAIS, Bea Cukai, BNN, Disperindag Prov. Sulawesi Selatan dan Akademisi) dalam rangka pengembangan jejaring, sharing informasi dan konsultasi hukum pidana
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS dan personil Fungsi Penindakan terkait pencegahan, penindakan dan penegakan hukum secara berkelanjutan, dalam menghadapi

tantangan penanganan perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital

3. Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan penyidikan yang relatif cukup memadai.

Indikator ini mencerminkan kemampuan BBPOM Makassar dalam menindaklanjuti kejahatan di sektor obat dan makanan—mulai dari penelusuran, pembuktian, hingga keberhasilan proses penindakan. Capaian tahun 2020–2022 mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Namun demikian, tren penurunan dua tahun terakhir patut menjadi perhatian khusus karena meskipun volume kasus mungkin meningkat, rasio keberhasilannya justru menurun.

Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 10 perkara dengan dengan posisi berada pada:

1. SPDP sebanyak 2 perkara
2. P21 sebanyak 4 perkara
3. Tahap 2 sebanyak 4 perkara

Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada:

1. P21 sebanyak 4 perkara
2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara

sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan Desember 2024 sebesar 81,77%

Faktor eksternal seperti hambatan hukum, keterbatasan koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta tantangan dalam pembuktian kasus menjadi kemungkinan penyebab penurunan efektivitas ini.

8. Sasaran Kegiatan (SK 8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

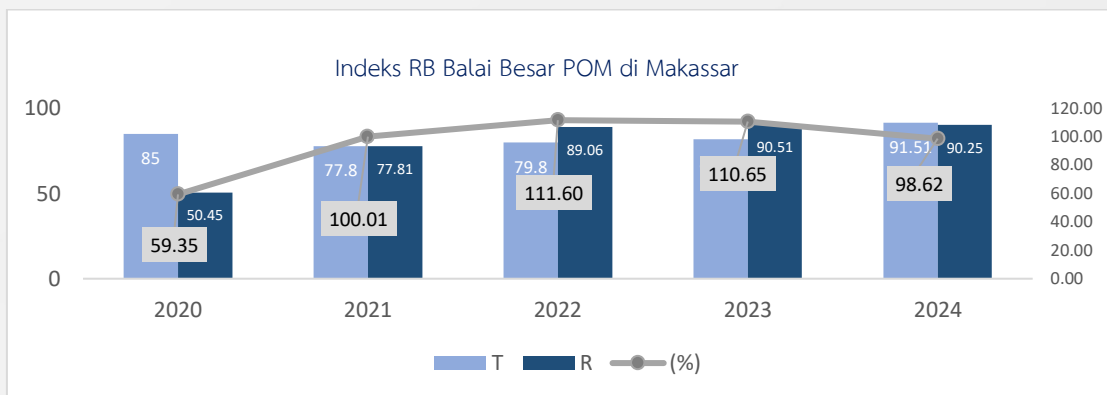
Pada Sasaran Strategis VIII Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal, terdapat indikator yaitu (1) Indeks RB BBPOM di Makassar, (2) Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dan kemudian pada tahun 2024 terdapat IKU Baru yaitu (3) Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Sejalan dengan pengarus utamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BBPOM di Makassar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Makassar akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BBPOM di Makassar berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal,

peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

IKSK. 8.1 : Indeks RB Balai Besar POM di Makassar



Nilai RB Balai Besar POM di Makassar diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Mulai Tahun 2023 terdapat perbedaan evaluasi RB dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024; Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

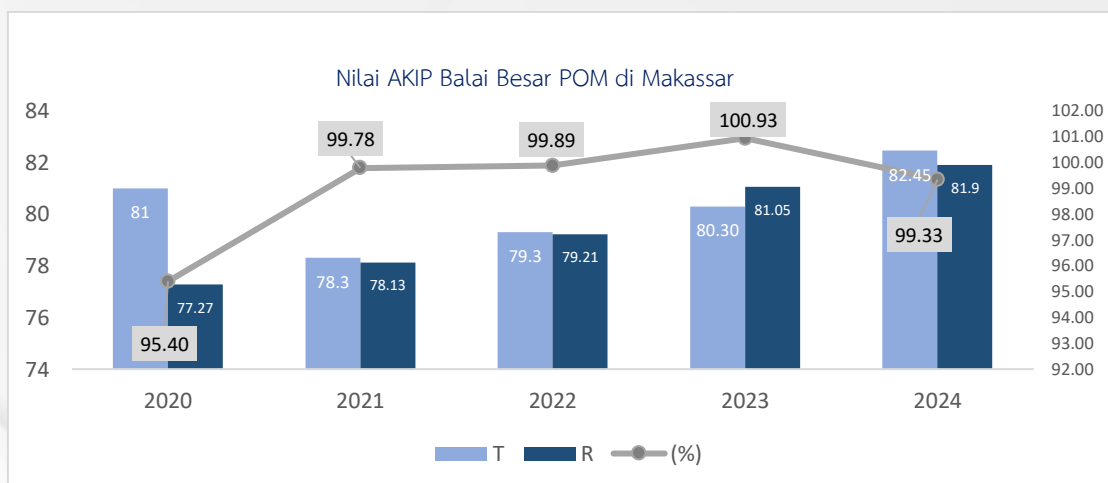
Meskipun sempat tertinggal pada tahun 2020, upaya pemulihan dan akselerasi reformasi berhasil dicapai, ditunjukkan oleh realisasi tahun 2021–2023 yang melampaui target. Penurunan capaian pada 2024 menunjukkan adanya **tantangan dalam mempertahankan momentum reformasi**, yang perlu segera direspon melalui evaluasi menyeluruh terhadap area perubahan yang masih stagnan

namun dari data 2021-2024 terdapat peningkatan *trend* Indeks RB Balai Besar POM di Makassar. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan Pembangunan ZI secara konsisten dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 serta Pada tahun 2024 BBPOM di Makassar berhasil meraih predikat WBBM. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Balai Besar POM di Makassar telah memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Selanjutnya BBPOM di Makassar akan terus berupaya untuk mempertahankan WBBM, konsistensi dan keberlangsungan program, kegiatan, dan inovasi yang dimiliki yang berdampak internal dan eksternal, melakukan evaluasi berkala yang menunjukkan upaya keberlangsungan pembangunan RB, pembaruan data dukung, melakukan penyempurnaan inovasi yang dimiliki dan menggali ide pengembangan inovasi baru yang dibutuhkan untuk internal maupun eksternal.

Selain itu melakukan penajaman beberapa inovasi unggulan yang berdampak eksternal dan selanjutnya dapat diikuti dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Penajaman ini perlu dilakukan sehingga terlihat inovasi tersebut semakin tinggi efektifitas dan efisiensinya, serta membawa dampak yang semakin nyata kepada masyarakat. Penambahan anggota AoC untuk penyegaran ide, kreatifitas, dan pemantauan khususnya terhadap inovasi- inovasi yang dimiliki. Anggota AoC ini juga menjadi penggerak/mengawal perwujudan WBBM.

IKSK. 8.2 : Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar



Nilai AKIP menggambarkan kualitas manajemen kinerja instansi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. BBPOM Makassar berhasil menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan akuntabilitas sejak tahun 2020 hingga mencapai nilai optimal pada 2023.

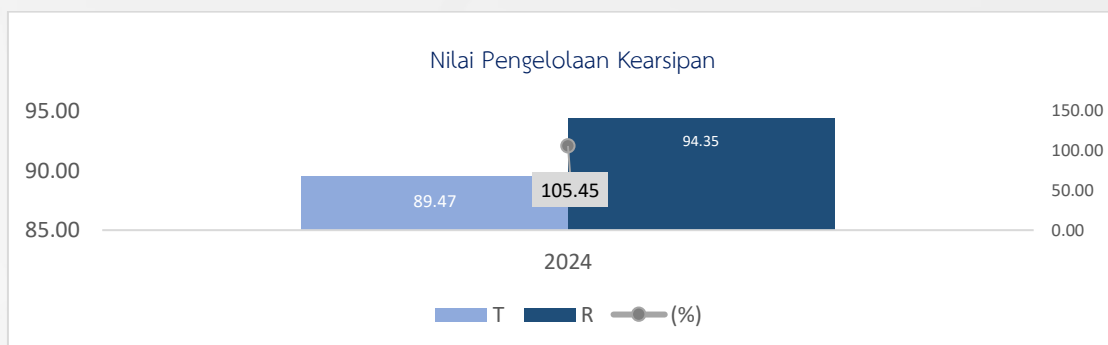
Meskipun nilai AKIP tersebut masih belum mencapai target selama 2020 – 2022 ; 2024, namun nilai AKIP BBPOM di Makassar tahun 2023 target dapat tercapai dengan realisasi sebesar 81,25 dilakukan dengan beberapa upaya seperti Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan; Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan; Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data; Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan; Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal; Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

Keberhasilan ini disebabkan oleh:

- Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management),
- Integrasi perencanaan dan pelaporan secara digital,
- Peningkatan pemahaman SDM terhadap indikator kinerja.

Meskipun capaian 2024 sedikit turun, namun masih berada dalam kategori akuntabilitas tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian internal dan evaluasi capaian telah berjalan dengan baik, meski perlu pemantauan berkelanjutan

IKSK. 8.3 : Nilai Pengelolaan Kearsipan



Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);

4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai Pengelolaan Kearsipan antara lain Melakukan pemberkasan untuk arsip konvensional maupun elektronik dengan mengelompokkan arsip berdasarkan kode klasifikasinya dan Pembuatan daftar arsip aktif dan daftar informasi arsip.

Pengelolaan kearsipan merupakan pondasi bagi akuntabilitas organisasi, terutama dalam sektor pemerintahan dan layanan publik. Dengan capaian **di atas 100%**, BBPOM Makassar menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem informasi dan dokumentasi yang rapi dan mudah ditelusuri.

Upaya ini sangat strategis, karena kearsipan:

- Mendukung transparansi pelayanan,
- Memudahkan audit internal maupun eksternal,
- Menjadi basis data untuk evaluasi dan perencanaan,
- Menjamin keberlanjutan dokumen hukum dan operasional

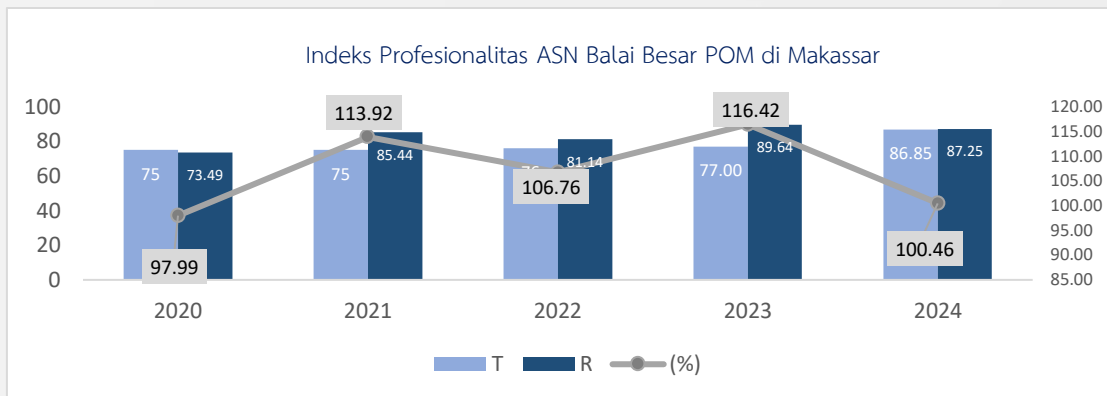
9. Sasaran Kegiatan (SK 9)

Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN.

Pada Sasaran Strategis IX Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal, terdapat indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar. Capaian indeks Upaya Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar fluktuatif selama periode 2020 sampai dengan 2024. Upaya terus dilakukan untuk memberikan capaian yang maksimal yaitu dengan Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat. Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi, Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2023, dan Pelatihan Dasar CPNS. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

IKSK. 9.1 : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar



Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu: Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar menunjukkan **tren yang positif dan stabil meningkat** dari tahun 2020 hingga 2024:

- 2020–2021: Terjadi peningkatan signifikan sebesar +11,95 poin dalam realisasi (dari 73,49 ke 85,44), mencerminkan upaya serius pembinaan ASN.
- 2022–2023: Terjadi konsistensi peningkatan dengan capaian di atas 100%, bahkan mencapai 116,42% di tahun 2023.
- 2024: Realisasi mencapai 87,25, sedikit di atas target (86,85), mempertahankan capaian optimal.

Capaian positif selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan SDM di BBPOM Makassar diarahkan secara strategis untuk memenuhi standar Reformasi Birokrasi, mendukung layanan publik yang prima, dan memperkuat pengawasan obat dan makanan.

10. Sasaran Kegiatan (SK 10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

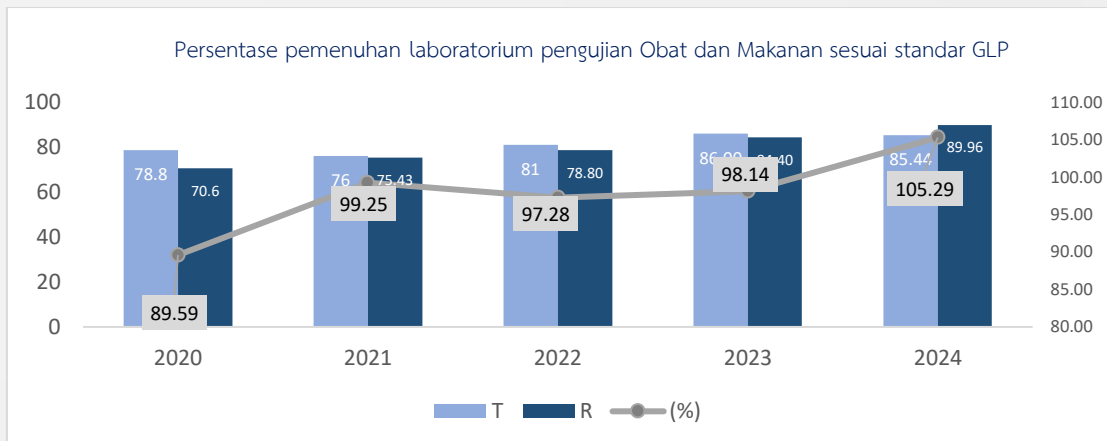
Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan

pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

IKSK. 10.1 : Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



GLP/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Penguji. Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan nilai SKL Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) dan Nilai SKL Balai Besar/Balai POM. Tahun 2020: Capaian awal masih di bawah target (89,59%), mengindikasikan adanya keterbatasan sarana prasarana atau sistem mutu laboratorium pada masa awal.

Tahun 2021–2023: Terjadi peningkatan yang stabil dengan capaian mendekati 100%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen laboratorium dan penerapan prinsip GLP.

Tahun 2024: Untuk pertama kalinya capaian melampaui target (105,29%), mencerminkan bahwa laboratorium BBPOM Makassar telah mengadopsi standar GLP secara lebih optimal.

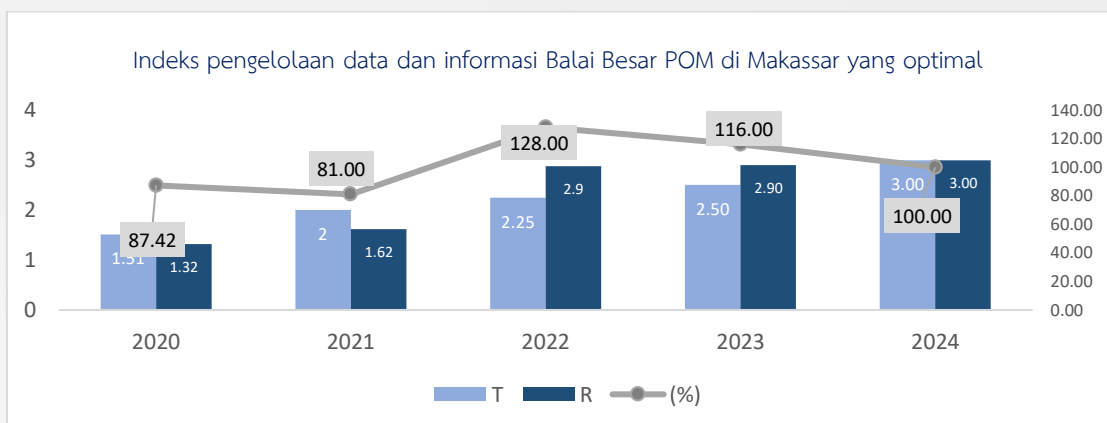
Standar GLP merupakan pedoman internasional yang memastikan integritas, kualitas, dan keandalan hasil pengujian laboratorium. Peningkatan persentase pemenuhan terhadap standar ini menunjukkan bahwa BBPOM Makassar telah Meningkatkan sarana laboratorium, meningkatkan kapasitas SDM pengujian, memperkuat dokumentasi dan pencatatan mutu, dan Mengadopsi sistem manajemen laboratorium berbasis mutu. Secara umum, tren 2020–2024 bersifat positif, dan menjadi pondasi penting untuk mendukung akurasi pengawasan mutu obat dan makanan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- Penambahan Ruang Lingkup telah berhasil dilaksanakan (19 metode) yaitu lab Obat 6 metode, lab Kosmetik 1 metode, Lab Pangan 8 metode, Lab Mikro 2 metode dan Lab OT 4 metode sehingga diperoleh peningkatan pemenuhan SRL dari 87,73% menjadi 91,73%)
- Penambahan kompetensi pengetahuan dan keterampilan personil lab sebanyak 25 kompetensi, peningkatan pemenuhan dari 89,10% menjadi 90,27%)
- Pemenuhan terhadap standar peralatan mengalami peningkatan dari 84,72% menjadi 87,89% akibat pengadaan peralatan penunjang dan utama (GC MS) yang telah selesai proses pengadaannya, sebaliknya pengadaan DUSA belum terlaksana menunggu arahan P3OMN
- Beberapa penyebab belum tercapainya pemenuhan RL laboratorium Obat, OT-SK, Kosmetik dan Mikrobiologi yaitu kesulitan untuk memperoleh sampel, reagensia dan baku pembanding. yang sulit serta pengadaan peralatan (GC-MS) diakhir tahun masih tahap uji fungsi dan belum memungkinkan digunakan untuk pengujian.
- Peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan masih terkendala GC MS yang masih tahap uji fungsi.
- Beberapa peralatan yang masuk dalam standar peralatan tidak digunakan dalam pengujian sampel di lab manapun seperti refraktometer dsb

IKSK. 10. 2 : Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Makassar yang optimal



Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM adalah Mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup email, sharing folder, dashboard BCC pimpinan, dan berita aktual pada subsite balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan (dihitung dari traffic pengiriman dan penerimaan email) oleh unit kerja, bidang/bagian/maupun individu.

Pemanfaatan sharing folder melihat jumlah akses pemanfaatan sharing folder dalam satu bulan. Pemanfaatan dashboard BCC pimpinan, dihitung terhadap intensitas login (40%) dan pemanfaatan data pada dashboard BCC (60%).

Sedangkan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal selama tahun 2020 sampai dengan 2024 memperoleh capaian kinerja di atas 100%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain melakukan monev input SIPT setiap bulan; memutakhirkan SPIMKER tepat waktu; meningkatkan akses email pegawai dengan mentautkan Absensi Apel Online dengan halaman login email pom.go.id, serta mengirim email pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui email pom.go.id dengan permintaan untuk reply; meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim media sosial & berita aktual.

Tahun 2020–2021: Capaian indeks belum memenuhi target. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data dan informasi BBPOM Makassar masih dalam tahap pengembangan, serta terdapat beberapa kendala pada integrasi sistem digital atau SDM pengelola data.

Tahun 2022: Terjadi lonjakan capaian signifikan (128%), menunjukkan perbaikan drastis dalam manajemen informasi yang merupakan hasil dari penerapan sistem informasi berbasis digital atau peningkatan kompetensi pengelola.

Tahun 2023–2024: Capaian terus berada di atas target (116% pada 2023 dan mencapai 100% pada 2024), menandakan konsistensi dan keberlanjutan performa dalam pengelolaan data dan informasi.

11. Sasaran Kegiatan (SK)

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Pada Sasaran Strategis XI Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, terdapat indikator yaitu Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar (1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, (2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker), (3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan (4) Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar mengalami peningkatan di tahun 2024 adapun upaya perbaikan yang terus dilakukan BBPOM di Makassar untuk dapat memperoleh capaian optimal yaitu dilakukan usulan penurunan target Indikator Nilai Kinerja Anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan; dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian IKPA yang nilainya belum 100; dilakukan

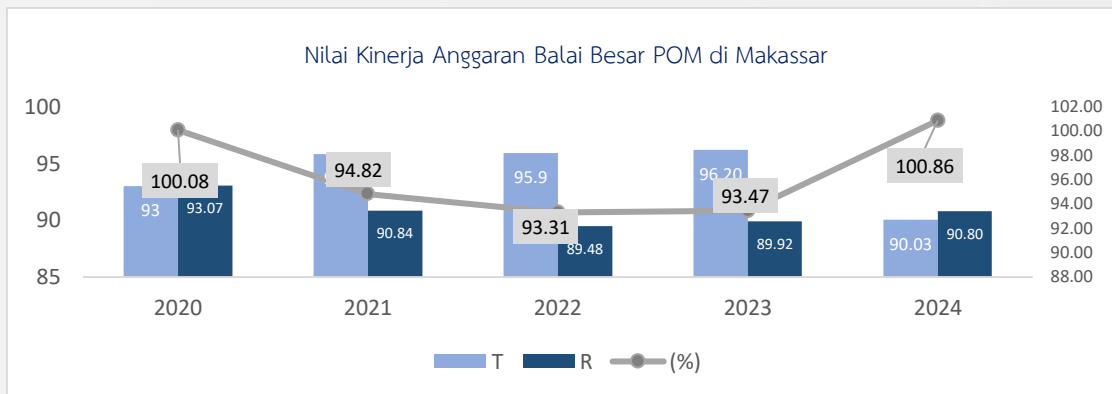
koordinasi secara intensif dengan KPPN Makassar II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pengukuran kinerja indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker), Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. Capaian ketiga indikator ini sudah optimal dan BBPOM di Makassar akan terus meningkatkan kinerja tersebut. Upaya untuk capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker) diantaranya dengan Koordinasi dengan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket pengadaan; Selalu cek ketersediaan Stok dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan dilakukan. dan segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal. Upaya yang dilakukan untuk capaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu memastikan Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN; memastikan Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RKBMN; memastikan Pengusulan PSP BMN yang baru diperoleh telah dilakukan dan telah mendapatkan SK persetujuan nya sehingga nilai perbandingan dengan total asset menjadi baik; melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan BMN Rusak Berat kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtanganan BMN – lelang, setelah final proses nya dilakukan update diaplikasi dan laporan penghapusan sehingga Total Aset Rusak Berat telah selesai ditindaklanjuti; Melakukan monev dan pendataan secara periodik serta mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Persediaan usang/rusak kepada pengelola, melakukan proses tindaklanjut pemindahtanganan Persediaan Usang – pihak ke3, setelah final prosesnya dilakukan update diaplikasi dan laporan pemusnahan sehingga Persediaan Usang/Rusak telah selesai ditindaklanjuti.

Upaya atas capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri berupa penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Selalu Koordinasi dengan PPK dan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket antara PDN dan Impor, Selalu dilakukan revisi paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan POK terakhir baik swakelola, penyedia maupun penyedia dalam swakelola; selalu cek dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan, apakah termasuk kategori PDN / TKDN atau Impor; dan melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal yang PDN.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

IKSK. 11. 1 : Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar



Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

- Revisi DIPA
- Deviasi Halaman III DIPA
- Penyerapan anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan UP dan TUP
- Dispensasi SPM
- Capaian Output

revisi DIPA, deviasi halaman IVI DIPA, penyerapan anggaran, retur SP2D, penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi penyampaian SPM dan capaian *output*. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 96,59

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021 berada pada angka 94,82 kategori “Cukup” lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 100,08 kategori “Sangat Baik” ; Terdapat penurunan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar sebesar 2,23 point tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 93,30 kategori “Cukup” lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 94,82 kategori “Cukup”. Serta penurunan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM

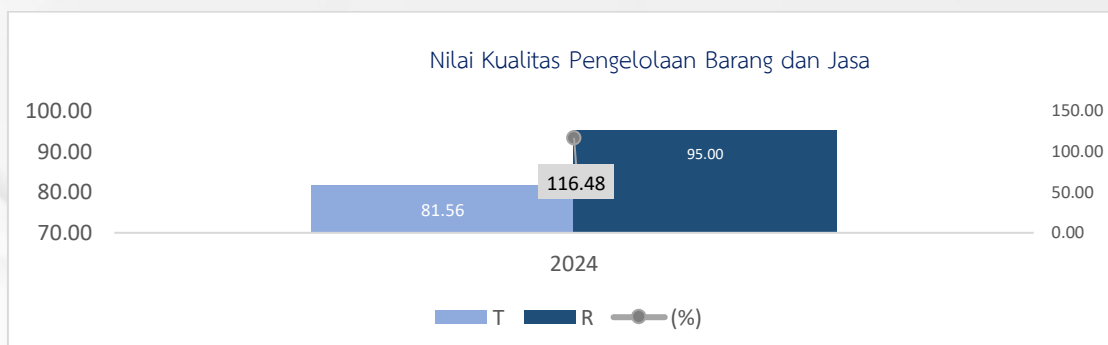
di Makassar sebesar 1,52 point; serta mengalami peningkatan 0,44 point tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 89,92 menjadi 89,48 pada kategori “Cukup”. Dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dengan kategori sangat Baik jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan kategori Cukup.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencerminkan efisiensi dan efektivitas tata kelola anggaran oleh BBPOM Makassar dalam mendukung pencapaian output dan outcome organisasi. Tren lima tahun menunjukkan bahwa meskipun sempat, mengalami penurunan efektivitas penggunaan anggaran pada 2021–2023, terdapat konsistensi dalam mempertahankan kinerja di atas 90%, kategori Cukup. Kinerja tahun 2024 yang meningkat kembali menjadi indikator bahwa BBPOM Makassar telah melakukan langkah korektif terhadap isu-isu perencanaan dan penyerapan anggaran sebelumnya.

Upaya-upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IV DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) sebagai akibat adanya kesalahan penggunaan akun;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;
- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode Tahun ketiga Renstra 2020-2024
- Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
- Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

IKSK. 11. 2 : Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

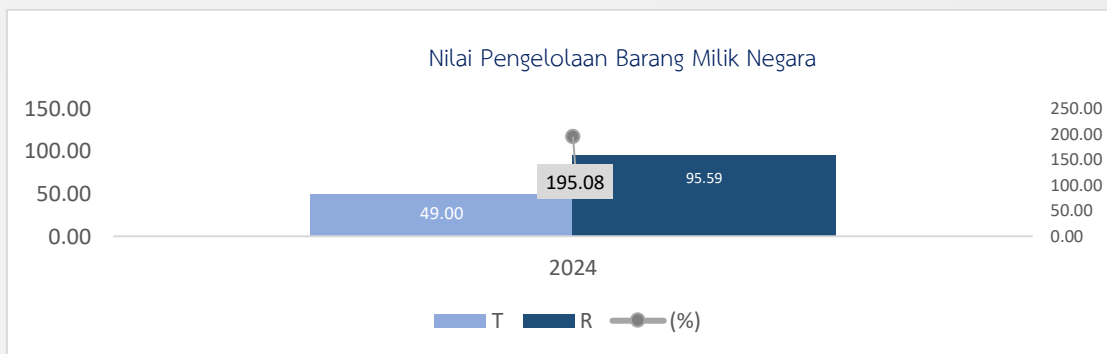


Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%).
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).
5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

Realisasi indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024 adalah 95 dari target 81,56 sehingga capaian indikator adalah 116,48% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator direktif yang baru dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya

IKSK. 11. 3 : Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

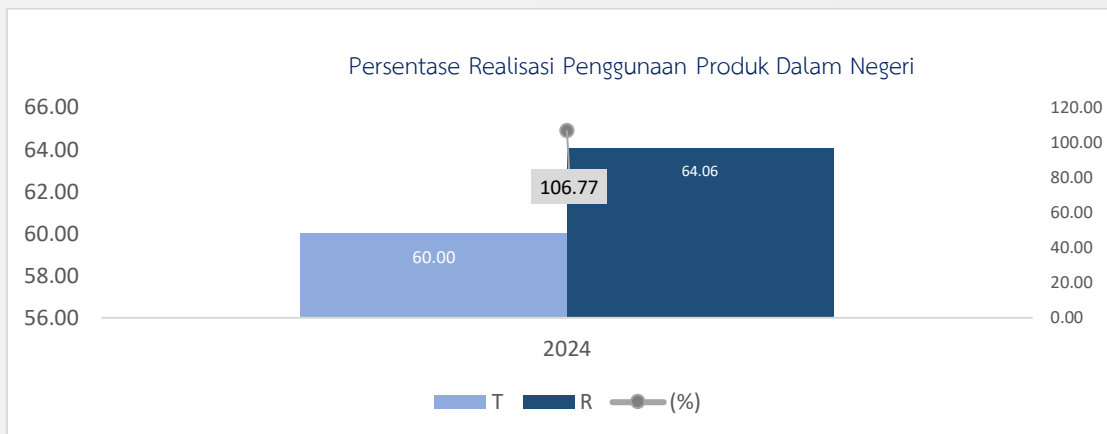


Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%) a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN

Untuk Tahun 2023 Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan BMN merupakan Direktif Penugasan sehingga untuk Target BBPOM di Makassar berdasarkan Exercise dari Biro Umum dinilai 49, sementara hasil Realisasi yang dicapai Pada Tahun 2023 TW III sebesar 97 sehingga secara persentase

capaian dan kriteria tidak bisa diukur karena ini merupakan IKU Direktif Penugasan yang baru dimasukkan kedalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Untuk Target 2024 berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : B-KP.09.01.24.01.24.40 Tanggal 22 Januari 2024 perihal Direktif penugasan untuk Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sudah Menjadi IKU dan masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai dengan Target 49, jika dihitung dengan capaian realisasi 95,59 maka persentase capaian Penilaian sebesar 195,08% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

IKSK. 11. 4 : Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri



Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

Realisasi indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri BBPOM di Makassar tahun 2024 adalah 64,06 dari target 60 sehingga capaian indikator adalah 106,77% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator direktif yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

1.1.1. Aspirasi Stakeholder

Menghadapi era globalisasi dan perkembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang semakin modern dan ketat, Balai Besar POM di Makassar tidak hanya dituntut untuk fokus pada kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, namun juga harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait atau stakeholder. Sebagai upaya perkuatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Makassar memahami pentingnya melakukan identifikasi dan harapan stakeholder, serta mengelola aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk lintas sektor dan masyarakat. Keikutsertaan pihak terkait dan masyarakat merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Dalam mengelola aspirasi stakeholder yang beragam, diperlukan komunikasi efektif. Hal ini bertujuan agar Balai Besar POM di Makassar dapat memberi respon dan mencari solusi secara efektif dan efisien. Untuk memberikan wadah terhadap aspirasi pihak terkait dan masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar secara rutin dan berkala menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan juga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan setiap tahun, Ruang lingkup dalam pelaksanaan FKP meliputi, yaitu Rancangan Kebijakan, Penerapan Kebijakan, Dampak Kebijakan, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan dan Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik. Serta terdiri atas 6 unsur yaitu : Penyelenggara Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Masyarakat, Pengguna Layanan, Ahli/Pakar, dan Media Masa, sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat diberikan kepada responden yang menerima layanan Balai Besar POM di Makassar. Survei dilakukan sepanjang tahun dengan menggunakan metode pengisian kuesioner terkait layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saran, masukan dan juga aspirasi yang diperoleh saat kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, dapat disimpulkan, untuk melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif dan efisien, langkah yang perlu diambil, antara lain :

- a. Koordinasi dengan PTSP untuk melakukan pengecekan data pada sistem OSS;
- b. Pemberian kompensasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan;
- c. Mitigasi resiko dan meningkatkan kompetensi petugas;
- d. Melengkapi informasi PPID pada subsite Balai Besar POM di Makassar;
- e. Meningkatkan pengawasan dan publikasi;
- f. Melakukan pembaharuan dasar hukum pada standar pelayanan;
- g. Melakukan review petunjuk teknis/SOP untuk pelaksanaan penelitian.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya

berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional.

Untuk menyusun arah kebijakan dan strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, diperlukan langkah awal berupa identifikasi potensi serta permasalahan yang dihadapi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai penugasan RPJMN 2025–2029 serta arah pembangunan ke depan. Analisis yang komprehensif terhadap lingkungan strategis menjadi kunci dalam memastikan tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Makassar dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, pemetaan isu-isu strategis yang relevan perlu dilakukan sebagai dasar dalam perumusan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Makassar dihadapkan pada beragam faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi efektivitas kinerja kelembagaan. Faktor-faktor internal mencerminkan kondisi sumber daya, sistem, serta kapasitas kelembagaan yang secara langsung berada dalam kendali organisasi. Sementara itu, faktor-faktor eksternal menggambarkan dinamika lingkungan strategis yang berasal dari luar lembaga, seperti perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, tren industri, hingga tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan layanan publik yang berkualitas.

Analisis terhadap isu-isu strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi ke depan. Melalui identifikasi isu internal, BBPOM di Makassar dapat memetakan kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam menjalankan mandat pengawasan, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana laboratorium, manajemen mutu, hingga efektivitas tata kelola anggaran dan budaya organisasi. Sementara itu, analisis isu eksternal memungkinkan lembaga mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat, seperti pertumbuhan industri, digitalisasi perdagangan, perubahan regulasi nasional dan global, serta meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Dengan memahami kedua sisi lingkungan strategis tersebut secara komprehensif, BBPOM di Makassar dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi hasil (outcome-based). Isu-isu internal dan eksternal yang diidentifikasi tidak hanya merepresentasikan tantangan yang dihadapi, tetapi juga peluang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap risiko obat dan makanan.

Oleh karena itu, bagian berikut menguraikan secara sistematis isu strategis internal dan eksternal yang relevan dengan mandat dan arah kebijakan BBPOM di Makassar untuk periode 2025–2029, sebagai dasar dalam penetapan strategi, program, dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis.

1.2.1. Analisis SWOT

1.2.1.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Makassar, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Makassar

keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Makassar di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Makassar, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

A. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berpengalaman

BBPOM di Makassar memiliki jumlah ASN yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, berkisar 110–127 orang, dengan mayoritas pada usia produktif. Sebanyak 92 pegawai menduduki jabatan fungsional, 90,22% di antaranya merupakan fungsional farmasi dan makanan, dengan spesialisasi pada pengujian, pemeriksaan, penindakan, serta komunikasi informasi.

Karakteristik Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Masa Kerja, dan Pendidikan

Kriteria	Kategori	Jumlah	Persentase
Umur	20-28 tahun (Gen Z)	4	3,64%
	29-44 tahun (Milenial/ Gen Y)	48	43,64%
	45-58 tahun (Gen X)	58	52,73%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	33	30,00%
	Perempuan	77	70,00%
Pendidikan	SLTA/Sederajat	6	5,45%
	D3	1	0,91%
	S1	45	40,91%
	Profesi	29	26,36%
	S2	29	26,36%
Masa Kerja Pegawai	di bawah 5 tahun	14	12,73%
	5-10 tahun	11	10,00%
	diatas 10 tahun	85	72,27%

Komposisi sumber daya manusia BBPOM di Makassar menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan yang kompleks dan berisiko tinggi. Dari aspek umur, mayoritas

pegawai berada pada kelompok usia produktif matang, yaitu Gen X (52,73%) dan Milenial/Gen Y (43,64%), yang mencerminkan keseimbangan antara pengalaman kerja yang panjang dengan kapasitas adaptasi terhadap dinamika kebijakan dan teknologi. Dominasi kelompok usia ini memberikan fondasi yang kuat bagi kesinambungan pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan yang matang, serta pembinaan teknis bagi pegawai yang lebih muda.

Dari sisi masa kerja, sebanyak 72,27% pegawai memiliki masa kerja di atas 10 tahun, menunjukkan tingkat pengalaman institusional yang tinggi serta pemahaman yang mendalam terhadap regulasi, prosedur teknis, dan karakteristik pengawasan di wilayah kerja. Kondisi ini memperkuat kapasitas organisasi dalam menjaga konsistensi penerapan standar, mitigasi risiko pengawasan, serta penanganan kasus secara efektif dan akuntabel.

Kekuatan SDM juga tercermin dari kualifikasi pendidikan, di mana 93,63% pegawai memiliki pendidikan S1, Profesi, dan S2. Tingginya proporsi pegawai dengan latar belakang profesi dan pascasarjana (26,36%) menjadi modal strategis dalam pelaksanaan fungsi teknis seperti pengujian, inspeksi, sertifikasi dan penindakan. Dukungan keilmuan ini memastikan bahwa setiap proses pengawasan dilaksanakan secara ilmiah, objektif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta standar internasional. Komposisi ini menjadi modal kuat bagi BBPOM di Makassar untuk mempertahankan mutu pengawasan berbasis risiko, meningkatkan akurasi hasil uji, serta memperkuat kapabilitas teknis dalam mendukung kebijakan keamanan obat dan makanan. Selain itu, komposisi jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan (70%) turut memperkuat kapasitas organisasi, khususnya dalam aspek ketelitian, konsistensi, dan keberlanjutan pelaksanaan tugas. Keberagaman gender ini juga mencerminkan penerapan prinsip inklusivitas dan mendukung pencapaian kinerja organisasi yang berimbang.

Secara keseluruhan, struktur SDM BBPOM di Makassar menunjukkan kekuatan internal yang solid berupa tenaga kerja yang kompeten, berpengalaman, dan berpendidikan tinggi, sehingga menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian kinerja pengawasan obat dan makanan yang efektif, profesional, dan berkelanjutan serta memperkuat kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko. Struktur SDM ini memberikan landasan kuat bagi BBPOM di Makassar untuk terus beradaptasi terhadap dinamika eksternal, mendukung transformasi digital, serta memastikan kesiapan kelembagaan dalam mencapai sasaran strategis pada periode Renstra 2025–2029.

Sejalan dengan kekuatan tersebut, hasil penilaian kompetensi mansoskul menunjukkan bahwa 14 persen pegawai berada pada kategori optimal dan 43 persen dalam kategori cukup optimal. Angka ini menggambarkan besarnya potensi penguatan kapasitas yang sudah dimiliki lembaga, sekaligus menegaskan kesiapan SDM untuk dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai program peningkatan kompetensi. Proporsi pegawai yang berada pada dua kategori teratas tersebut menjadi modal strategis bagi BBPOM di Makassar untuk memperkuat aspek kepemimpinan operasional, kolaborasi lintas sektor, serta komunikasi publik yang lebih efektif. Dengan kapabilitas teknis yang telah solid dan peluang penguatan mansoskul yang terbuka lebar, BBPOM di Makassar memiliki posisi yang sangat strategis untuk terus meningkatkan performa kelembagaan dan inovasi pengawasan ke depan.

Dengan mempertimbangkan kekuatan demografis dan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini, serta besarnya ruang penguatan mansoskul yang telah teridentifikasi melalui hasil penilaian internal, BBPOM di Makassar memiliki dasar yang kuat untuk menyusun proyeksi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang. Proyeksi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formasi, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya komposisi kompetensi yang sejalan dengan arah penguatan pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecenderungan peningkatan tugas dan cakupan pengawasan, termasuk perluasan fungsi patroli siber, pembinaan pelaku usaha, serta integrasi data lintas sektor, menuntut adanya penguatan kapasitas dan jumlah pegawai secara terstruktur. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM dalam lima tahun ke depan dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis, manajerial, sosial, dan kultural secara seimbang, memastikan bahwa BBPOM di Makassar tetap adaptif dan kompetitif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM pada periode 2025–2029.

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan				
				CPN	PPP	2026	2027	2028	2029	2030		2026	2027	2028	2029	2030
1	Kepala Balai Besar POM di Makassar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Makassar	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Analisis Anggaran Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
8	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
9	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
10	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
12	Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					
13	Arsiparis Terampil	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2				1	1
14	Penata Laksana Barang Mahir	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2		1	1		
15	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3		1		1	1
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	20	18	0	0	1	4	2	2	0	11	3	4	2	2	
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	39	36	0	0	5	3	1	1	0	13	6	4	2	1	
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	40	20	0	0	1	1	1	0	1	24		15	5	3	1

1 9	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1					
2 0	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	6	0	0	2	0	1	1	0	-2					
2 1	Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
2 2	Perencana Ahli Muda	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
2 3	Perencana Ahli Pertama	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1				
2 4	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
2 5	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1		1			
2 6	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 7	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2 8	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
2 9	Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
3 0	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
3 1	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
3 2	Penata Kelola Obat dan Makanan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-2					
3 3	Penata Layanan Operasional	0	14	0	0	0	1	9	0	0	-4					
TOTAL		13 4	110	0	0	10	9	14	4	1	62	13	32	12	8	3

Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan SDM BBPOM di Makassar dalam kurun waktu 2025 - 2029 yaitu sebanyak 134 orang dengan jumlah pemenuhan pegawai hingga November 2025 adalah sebanyak 110 orang (Data pada aplikasi SIREN SDM Per 30 November 2025). Per November 2025 persentase pemenuhan SDM pada BBPOM di Makassar sebesar 85,82% yang terdiri dari 99 PNS dan 11 PPPK, sehingga masih terdapat gap/kekurangan SDM sebanyak 19 orang. Selama 2025-2029 terdapat pegawai yang memasuki BUP sebanyak 38 orang dan hingga November 2025 masih terdapat 2 orang menduduki jabatan Penata Kelola Obat dan Makanan dan 14 Penata Layanan Operasional. Upaya pemenuhan ABK dalam kurun waktu 2025-2029 BBPOM di Makassar melakukan perencanaan penambahan pegawai melalui pengadaan CASN dan mekanisme karier melalui kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan. Diperlukan adanya penambahan jabatan yang dibutuhkan pada kurun waktu 2025-2029.

Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan expertise global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan,

artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise di BPOM untuk mengawal pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, talent scouting, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan expertise bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten
Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karir, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.
2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten
Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun expertise bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial,

dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi second layer untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan expertise di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui talent scouting, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta.

Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi

Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Coporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (*learning ecosystem*) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.

4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital

Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, sosial dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship*, *initiative taking*, dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan complex information processing juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi skill shifting ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi. Langkah yang dilakukan antara lain dengan pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan,

kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital

B. Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Modern

Laboratorium BBPOM di Makassar memiliki sarana dan prasarana pengujian yang modern, lengkap, dan berteknologi tinggi, yang menjadi pilar utama dalam mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara ilmiah, objektif, dan berbasis risiko. Berbagai instrumen analisis mutakhir seperti LC-MS/MS, GC-MS, UHPLC, HPLC, Dissolution Tester, serta RT-PCR memungkinkan laboratorium melakukan pengujian dengan tingkat sensitivitas, selektivitas, dan akurasi yang tinggi, baik untuk deteksi cemaran kimia, residu bahan berbahaya, kontaminan mikrobiologi, hingga analisis biomolekuler.

Keberadaan peralatan tersebut mendukung cakupan pengujian yang komprehensif meliputi sediaan farmasi, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Selain itu, fasilitas laboratorium yang terbagi ke dalam laboratorium kimia, mikrobiologi, biomolekuler, dan uji sterilitas memungkinkan pelaksanaan pengujian secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan pengawasan serta meningkatkan ketepatan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran.

Dari aspek kelembagaan, Laboratorium BBPOM Makassar telah memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, yang menjamin kompetensi teknis laboratorium dalam menghasilkan data uji yang valid, tertelusur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan ISO 9001:2015 memastikan bahwa seluruh proses pengujian dan pelayanan laboratorium berjalan sesuai sistem manajemen mutu yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Penguatan integritas dan tata kelola juga diwujudkan melalui ISO 37001:2016, yang menegaskan komitmen laboratorium terhadap pencegahan praktik penyuapan dan penguatan budaya kerja berintegritas.

Dengan dukungan sarana laboratorium yang luas, instrumen berteknologi tinggi, serta sistem manajemen yang terstandar secara nasional dan internasional, BBPOM Makassar memiliki posisi strategis sebagai laboratorium rujukan yang andal di Kawasan Timur Indonesia. Kekuatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, mendukung penegakan hukum berbasis bukti ilmiah, serta meningkatkan daya saing layanan pengujian laboratorium dalam mendukung kebijakan pengawasan obat dan makanan secara berkelanjutan

C. Inovasi dan Digitalisasi

Ekosistem inovasi dan digitalisasi yang progresif mencerminkan kemampuan Balai Besar POM di Makassar dalam membangun budaya kerja yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Inovasi tidak semata dipahami sebagai penciptaan aplikasi atau pemanfaatan teknologi digital, melainkan juga meliputi terobosan layanan publik, penguatan komunikasi risiko, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaku usaha, serta pembaruan tata kelola internal. Seluruh inisiatif ini berangkat dari tantangan nyata di lapangan, kemudian dirumuskan menjadi solusi yang sistematis, sehingga melembaga sebagai bagian dari identitas kelembagaan.

BBPOM di Makassar secara berkelanjutan mengembangkan berbagai inovasi sebagai respon atas dinamika lingkungan strategis, kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi yang dikembangkan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperluas jangkauan pelayanan, serta memperkuat peran BBPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

NO	INOVASI	PENJELASAN
1	Seppulo	Sistem Pelayanan Publik Online merupakan database pelayanan publik yang diberikan oleh petugas layanan public BBPOM di Makassar dan mempermudah proses pengaduan dari masyarakat
2	Siyapp	Sistem Pelayanan Perbaikan Peralatan adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pelayanan Perbaikan Peralatan oleh Bagian Tata Usaha
3	Sinonim	Sistem Notifikasi Inventori Mandiri untuk mengetahui secara real time inventori peralatan yang dimiliki BBPOM di Makassar
4	Sudoku	Sistem Penyusunan Dokumen Unit merupakan inovasi yang dibuat untuk mengurangi penggunaan kertas sebagai bentuk dukungan BBPOM di Makassar dalam program ramah lingkungan dan mempermudah pegawai mengakses dokumen Sistem Mutu
5	Smile	Sistem Manajemen Informasi Lembur sebuah aplikasi di BBPOM di Makassar yang berfungsi untuk manajemen lembur pegawai, Mulai dari pengajuan lembur pegawai hingga tahap verifikasi absen.
6	Dasikuka	Pengendalian Sistem Keuangan Atas Kinerja Akuntabilitas merupakan inovasi yang mengakomodir kebutuhan internal dan public terhadap transparansi penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7	Masirika	Dimana dalam inovasi ini menetapkan pemberian penghargaan pada pegawai yang bisa membuktikan adanya penolakan menerima gratifikasi berupa penyerahan penghargaan, pengalungan selempang "Duta Anti Gratifikasi Masirika", serta memajang foto pegawai tersebut pada media sosial Balai Besar POM di Makassar.
8	Rapport	Reward and Punishment for Productivity yang bertujuan untuk penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Makassar
9	Visi Pemuda	Kegiatan berupa pembuatan video yang memaparkan hasil pembelajaran dan testimoni pengalaman yang diperoleh pelajar atau mahasiswa selama belajar di Balai Besar POM di Makassar

10	AKU BerAKHLAK	Merupakan inovasi untuk menginternalisasi core value ASN BERAHLAK dan BUdaya organisasi Badan POM PIKKIR, mencakup inovasi Agent of Change Balai Besar POM di Makassar sebagai berikut: - Serambi : Senin Berakhlak Kamis ber-PIKKIR - Bossmen : BPOM Semenit - Mawas : Monitoring Pengawasan Sarana - PORENA : Podcast Bareng AoC BBPOM Makassar - SIMBA : Sistem Manajemen Limbah - KUPAS : Kuisisioner Pengawasan
11	SAPPAI	Searching Status Pengujian Sampel Pihak Ketiga : dengan aplikasi ini memudahkan Pihak Ketiga atau customer untuk melacak atau mengetahui status sampel yang diujikan di BBPOM di Makassar serta memungkinkan customer mengunduh sertifikat hasil uji secara mandiri sehingga lebih efisien waktu dan biaya. Aplikasi ini telah diadopsi oleh Pusat Data dan Informasi BPOM RI
12	Mobil Keliling Laboratorium Kosmetik dan Pangan Aman atau Molkika Plus	Merupakan inovasi Unggulan (sejak tahun 2021 sampai sekarang) BBPOM di Makassar yang bertujuan membantu Masyarakat dalam memilih kosmetika dan pangan aman dari bahan berbahaya dengan melakukan uji kosmetika dan pangan menggunakan test kit di Mobil Laboratorium Keliling. Inovasi ini bekerjasama dengan stake holder terkait antara lain Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Dinas lainnya.
13	INOVASI UNGGULAN 2024 "Pelayanan Mantappoll Sul-Sel"	Kemudian tahun 2024 inovasi Unggulan Molkika Plus ini, dikembangkan lagi sebagai Inovasi Unggulan menuju WBBM, dengan maksud memperluas pelayanan agar lebih merata antara pelayanan di perkotaan dan di pelosok negeri wilayah SULSEL Pengawasan dan Pelayanan Obat dan Makanan Terpadu Menjangkau Kota Hingga Pelosok Sulawesi Selatan merupakan inovasi pengembangan Molkika Plus yang telah dimulai sejak tahun 2021 dan dikembangkan pada tahun 2023 yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik (mantap) dan maksimal (poll) yang dimiliki dengan menjemput bola dalam artian memberikan pemerataan layanan seperti mendekatkan kantor Balai Besar POM di Makassar mulai dari Kota hingga pelosok desa termasuk wilayah kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan.
14	Pedang Puang Basok	merupakan Pendampingan Pelaku UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik melalui kegiatan pendampingan dengan memberikan fasilitas dan informasi yang tajam terhadap UMKM sehingga dapat mengangkat dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan adanya legalitas berupa nomor izin edar produk
15	Tallapa	Taber' Lapor Pak adalah inovasi yang mengakomodir Masyarakat untuk melaporkan pegawai BBPOM di Masyarakat yang menerima gratifikasi melalui nomor Whtasapp 081355113321

Inovasi di BBPOM di Makassar tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup inovasi tata kelola, metode pengawasan, pendekatan pembinaan pelaku usaha, serta strategi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Pendekatan inovatif ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra BPOM Tahun 2025–2029 yang menekankan transformasi pengawasan Obat dan Makanan, penguatan regulatory assistance, serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital dan kolaboratif.

D. Konsistensi Pencapaian Kinerja dan Budaya Integritas

BBPOM di Makassar berhasil menjaga capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada kategori *Sangat Baik* serta Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada kategori *Bersih dari Korupsi*. Capaian tersebut mencerminkan telah terinternalisasinya budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan orientasi pelayanan prima dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi. Konsistensi kinerja pelayanan publik dan penguatan sistem pengendalian internal menjadi indikator bahwa prinsip

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah diterapkan secara efektif. Pencapaian ini memperkuat legitimasi BBPOM di Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang profesional, transparan, serta dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengawasan Obat dan Makanan.

E. Jejaring Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor yang Kuat dan Komitmen Pimpinan

BBPOM di Makassar memiliki kekuatan yang signifikan dalam bentuk jejaring kerja sama lintas sektor yang terbangun secara berkelanjutan dan didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat. Jejaring kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi teknis terkait, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta komunitas dan masyarakat. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi modal strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, khususnya dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas tantangan pengawasan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Kerja sama yang terbangun tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga kolaboratif dan operasional, terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana, pengawasan peredaran produk, penindakan pelanggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, serta pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Kolaborasi ini memperkuat daya jangkauan pengawasan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif oleh pemangku kepentingan terkait.

Kekuatan jejaring kerja sama tersebut diperkuat oleh komitmen pimpinan BBPOM di Makassar yang secara konsisten mendorong sinergi lintas sektor, penguatan tata kelola, dan peningkatan kinerja organisasi. Pimpinan berperan aktif dalam mengarahkan strategi pengawasan, memastikan keselarasan kebijakan unit kerja dengan arah kebijakan nasional BPOM, serta menumbuhkan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan orientasi pada pelayanan publik.

Jejaring kerja sama yang solid dan kepemimpinan yang berkomitmen tersebut menjadi kekuatan utama BBPOM di Makassar dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks pada periode perencanaan 2025–2029.

F. Kemampuan Pelaksanaan KIE dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan

BBPOM di Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk melalui pendekatan komunitas, sekolah, pasar, dan pemanfaatan media digital.

Kegiatan KIE yang konsisten dan kontekstual menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.

1.2.1.2 Kelemahan (Weaknes)

Dalam menghadapi dinamika kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang meningkat, Balai Besar POM di Makassar tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Makassar, yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

A. Kesenjangan SDM terhadap luas wilayah dan beban kerja pengawasan BBPOM di Makassar menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan jumlah dan sebaran SDM dibandingkan dengan luas cakupan wilayah kerja, banyaknya sarana produksi/distribusi, serta intensitas kegiatan pengawasan (pemeriksaan sarana, sampling-pengujian, penindakan, KIE, dan layanan publik). Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan *trade-off* antara kuantitas cakupan pengawasan dan kedalaman pemeriksaan, serta memengaruhi kecepatan respon terhadap isu prioritas (misal temuan produk ilegal/TMS, pengaduan masyarakat, atau kejadian luar biasa terkait produk).

B. Keterbatasan dukungan sarana-prasarana operasional pengawasan lapangan

Sebagai wilayah dengan karakteristik akses yang beragam (perkotaan, kabupaten luas, hingga area dengan keterbatasan transportasi), pengawasan lapangan memerlukan dukungan operasional yang memadai. Kelemahan yang masih muncul adalah keterbatasan sarana mobilitas, peralatan inspeksi spesifik, dan dukungan logistik pengawasan untuk menjangkau wilayah dengan akses menantang. Kondisi ini dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan pengawasan rutin, pengawasan terpadu, maupun kegiatan respons cepat.

C. Variasi kepatuhan pelaku usaha terutama UMKM masih tinggi
Struktur pelaku usaha di Sulawesi Selatan banyak didominasi UMKM di sektor pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik. Kondisi internal yang menjadi kelemahan operasional adalah tingginya kebutuhan pembinaan/pedampingan dibandingkan kapasitas SDM pendamping, serta tingkat literasi regulasi yang belum merata pada pelaku usaha. Pada praktiknya, isu kepatuhan paling sering muncul pada aspek higiene sanitasi, dokumentasi, pemenuhan CPPOB/CPKB/CPOTB, serta penandaan/iklan.

D. Keterbatasan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Laboratorium Balai Besar POM di Makassar telah dilengkapi dengan program perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala guna menjaga keberfungsian instrumen pengujian. Program ini pada prinsipnya telah berjalan sesuai standar, namun dalam implementasinya

masih memerlukan optimalisasi. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan sejumlah instrumen yang telah memasuki masa pakai panjang dan mendekati akhir siklus pemanfaatannya, sehingga memerlukan intensitas pemeliharaan yang lebih tinggi serta perencanaan peremajaan yang berkesinambungan.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, karena di satu sisi laboratorium harus tetap mampu memenuhi target pengujian ratusan sampel setiap tahunnya, sementara di sisi lain terdapat keterbatasan alokasi sumber daya untuk melakukan pemeliharaan secara preventif yang menyeluruh. Akibatnya, sebagian kegiatan perawatan masih bersifat korektif ketika terjadi kerusakan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan peralatan dan memperpanjang waktu layanan.

Permasalahan ini bukan terletak pada ketiadaan program perawatan, melainkan pada kebutuhan optimalisasi manajemen aset laboratorium agar lebih adaptif terhadap kondisi instrumen dengan masa pakai panjang. Strategi penguatan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas program pemeliharaan preventif, perencanaan re-investasi sarana secara bertahap, serta pengalokasian anggaran yang lebih terukur. Dengan langkah-langkah tersebut, BBPOM di Makassar akan mampu menjaga reliabilitas laboratorium, menjamin ketepatan hasil uji, dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan secara berkelanjutan.

E. Keterbatasan Kapasitas Sistem Informasi dan Integrasi Data

Sistem informasi pengawasan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Makassar saat ini telah mengalami kemajuan melalui penerapan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) yang mengakomodir hasil kegiatan pengujian produk obat dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja. Melalui SIPT, data hasil pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan sarana telah terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem pengawasan nasional yang dikelola oleh Badan POM. Namun demikian, hasil pengawasan dan pengujian yang terekam di dalam sistem tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, misalnya dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan Obat dan Produk Terapeutik yang dilaksanakan oleh Pemerintah serta penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur sistem informasi telah terbangun dan berfungsi baik, pemanfaatan data lintas unit masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendukung integrasi analisis strategis lintas Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah. Informasi hasil pengawasan yang diperoleh dari kegiatan pengujian dan pemeriksaan sebenarnya memiliki nilai strategis tinggi untuk mendukung efisiensi perencanaan kebutuhan laboratorium, penguatan pengendalian mutu, serta penyusunan kebijakan pengadaan yang lebih adaptif terhadap tren hasil pengawasan obat dan makanan. Namun, keterbatasan mekanisme analitik

dan sistem integrasi antarsumber data menyebabkan hasil pengawasan tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk memperkuat proses perencanaan dan evaluasi program secara komprehensif.

Selain faktor sistem, terdapat pula keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan dan analisis data digital. Hingga saat ini, pegawai BBPOM di Makassar belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait data science, analitik data, atau pemanfaatan teknologi big data yang relevan dengan kegiatan pengawasan. Hal ini menyebabkan kemampuan interpretasi data hasil pengujian dan pemeriksaan masih mengandalkan pendekatan manual dan deskriptif, belum berbasis analisis prediktif maupun model korelasi yang mampu mengidentifikasi tren risiko secara dini. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya fungsi sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam konteks deteksi pola pelanggaran, pemetaan risiko sarana produksi dan distribusi, serta penyusunan kebijakan pengawasan berbasis risiko.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BBPOM di Makassar perlu memperkuat integrasi sistem informasi pengawasan sekaligus meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pengelolaan dan analisis data digital. Optimalisasi pemanfaatan SIPT sebagai sumber data strategis perlu diiringi dengan pengembangan kompetensi teknis pegawai melalui pelatihan dan pendampingan di bidang data analytics, data visualization, dan decision support system. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan data hasil pengujian dan pemeriksaan tidak hanya sebagai dokumentasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan berbasis bukti dan kebijakan pengawasan yang responsif terhadap perubahan risiko di lapangan.

Dengan demikian, meskipun infrastruktur sistem informasi pengawasan BBPOM di Makassar telah berkembang secara signifikan, optimalisasi fungsi analisis data dan peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi masih menjadi prioritas strategis yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Melalui sinergi dengan unit teknis di Badan POM RI dan kerja sama dengan lembaga pelatihan profesional, BBPOM di Makassar diharapkan dapat mengembangkan ekosistem pengawasan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pemanfaatan data secara cerdas dan terintegrasi.

F. Keterbatasan Ruang Fiskal dan Fleksibilitas Anggaran untuk Respons Cepat

BBPOM di Makassar menghadapi tantangan internal berupa terbatasnya ruang fiskal dan fleksibilitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan respons cepat terhadap dinamika pengawasan Obat dan Makanan. Karakteristik pengawasan yang bersifat dinamis, insidentil, dan berisiko tinggi menuntut ketersediaan dukungan anggaran yang adaptif, sementara perencanaan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada awal tahun anggaran.

1. Keterbatasan ruang penyesuaian anggaran terhadap kebutuhan insidentil

Kebutuhan pengawasan yang muncul secara tiba-tiba, penanganan isu produk berisiko yang viral, peningkatan peredaran produk ilegal melalui media daring, atau penguatan pengawasan akibat kejadian luar biasa, belum sepenuhnya dapat diantisipasi dalam perencanaan awal. Kondisi ini membatasi ruang penyesuaian anggaran untuk segera mengakomodasi kebutuhan operasional yang mendesak.

2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yang bersifat kontinjensi

Dalam struktur anggaran yang ada, porsi anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk kegiatan kontinjensi atau insidentil masih terbatas. Akibatnya, pelaksanaan operasi pengawasan terpadu, pengujian tambahan di luar rencana, atau intensifikasi patroli siber sering kali bergantung pada ketersediaan anggaran dari kegiatan lain yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Ketergantungan pada penyesuaian prioritas antar kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan respons cepat, BBPOM di Makassar perlu melakukan penyesuaian prioritas antar kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun langkah ini memungkinkan pelaksanaan pengawasan mendesak, penyesuaian tersebut berpotensi memengaruhi kesinambungan pelaksanaan kegiatan lain yang bersifat pembinaan, edukasi, atau pengembangan kapasitas.

4. Keterbatasan fleksibilitas lintas jenis belanja

Kegiatan respons cepat umumnya memerlukan dukungan lintas jenis belanja, mulai dari operasional lapangan, pengujian laboratorium, hingga koordinasi lintas sektor. Namun demikian, ruang fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian antar jenis belanja relatif terbatas dan membutuhkan proses administratif yang bertahap.

5. Dampak terhadap pengembangan pengawasan berbasis risiko

Terbatasnya fleksibilitas anggaran juga mempengaruhi kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengembangkan pengawasan berbasis risiko yang memerlukan dukungan pendanaan adaptif, seperti pengujian targeted, penguatan intelijen pengawasan, dan eksplorasi data temuan baru.

6. Pengaruh terhadap persepsi kecepatan layanan pengawasan

Dalam konteks pelayanan publik, keterbatasan dukungan anggaran untuk respons cepat dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kecepatan dan ketegasan pengawasan yang

dilakukan BBPOM di Makassar, terutama pada isu Obat dan Makanan yang memiliki sensitivitas tinggi di masyarakat.

Terbatasnya ruang fiskal dan fleksibilitas anggaran menjadi kelemahan internal yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Makassar. Tantangan ini menuntut perencanaan yang lebih adaptif dan pengelolaan prioritas yang presisi agar respons pengawasan tetap efektif tanpa mengganggu capaian kinerja program lainnya.

1.2.1.3 Peluang (Opportunity)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Makassar untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Makassar untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

A. Potensi Pemanfaatan Jaringan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Hubungan kerja sama lintas sektor yang telah terbangun selama ini merupakan modal strategis eksternal yang memberikan peluang besar bagi Balai Besar POM di Makassar untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai mitra, baik pemerintah daerah, dunia akademik, organisasi profesi, maupun sektor swasta, telah membuka ruang sinergi dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perluasan dampak layanan publik di wilayah Sulawesi Selatan.

Hingga tahun 2025, kerja sama aktif yang telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat daerah. Jaringan kemitraan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga penyiaran, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum, yang berperan dalam memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan di Provinsi Sulawesi Selatan. Luasnya jejaring lintas sektor ini memberikan peluang signifikan bagi BBPOM di Makassar untuk memperluas pemanfaatan kolaborasi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah kerja.

Peluang pemanfaatan jaringan kerja sama tersebut antara lain:

1. Perluasan dukungan layanan publik dan integrasi fungsi pengawasan Kemitraan dengan DPMPTSP di Kota Makassar, Kabupaten di wilayah kerja BBPOM di Makassar memberikan peluang untuk memperluas kanal pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi obat dan makanan, serta

memperkuat koordinasi perizinan dan pembinaan pelaku usaha secara terintegrasi.

2. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan melalui kemitraan teknis dan edukatif

Kerja sama dengan IAI Provinsi Sulawesi Selatan, Universitas Negeri maupun Swasta, dan pemerintah daerah membuka ruang untuk peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, aparatur daerah, serta pelaku usaha melalui pelatihan bersama, magang, pendidikan masyarakat, dan kegiatan pembinaan terpadu.

3. Penguatan penegakan hukum dan komunikasi risiko melalui lembaga strategis

Kolaborasi dengan Kepolisian Daerah dan KPID Provinsi Sulawesi selatan memberi peluang besar untuk memperkuat penyidikan tindak pidana obat dan makanan, mempercepat pertukaran data intelijen pengawasan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi risiko publik dan pengendalian promosi obat serta makanan yang melanggar ketentuan.

Dari sisi prospek pengembangan, jejaring kolaboratif ini berpotensi besar untuk terus diperluas menjadi platform kemitraan strategis yang mendukung pengawasan berbasis digital, pengembangan riset pangan dan obat tradisional lokal, serta integrated risk communication lintas sektor. Tingkat keterlibatan mitra juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan keterlibatan aktif akademisi dalam penelitian bersama, pemerintah daerah dalam kegiatan pelayanan publik terpadu, dan lembaga masyarakat dalam diseminasi informasi keamanan pangan.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, BBPOM di Makassar berpeluang memperkuat posisinya sebagai pusat kolaborasi kebijakan dan inovasi daerah di bidang pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi publik, memperkuat daya saing kelembagaan, dan membuka akses terhadap sumber daya pengetahuan serta inovasi baru yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM 2025–2029.

B. Dukungan Program Prioritas Nasional (Makan Bergizi Gratis)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah Pusat merupakan agenda prioritas dalam mendukung peningkatan status gizi anak sekolah dan ketahanan pangan masyarakat. Bagi Balai Besar POM di Makassar, program ini menjadi peluang strategis untuk memperluas cakupan pengawasan pangan aman, bermutu, dan bergizi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta memperkuat kontribusi lembaga dalam agenda pembangunan kesehatan nasional.

Sebagai perpanjangan tangan Badan POM, BBPOM di Makassar berperan sebagai unsur pendukung teknis utama dalam pelaksanaan Program MBG di daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan maka Kepala BBPOM di Makassar ditetapkan sebagai salah satu anggota Satgas MBG Provinsi Sulawesi Selatan, bersama instansi lintas sektor lainnya, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Gizi Nasional. Keterlibatan ini menegaskan posisi

strategis BBPOM di Makassar dalam memastikan aspek keamanan, mutu, dan kelayakan pangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG.

Secara operasional, peran BBPOM di Makassar diwujudkan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan di sekolah dan lembaga penyelenggara MBG, pembinaan penyelia keamanan pangan (SPPG), serta pengujian sampel pangan bergizi untuk menjamin kesesuaian dengan standar keamanan dan mutu pangan. Kegiatan ini selaras dengan mandat Renstra BPOM 2025–2029, yang menargetkan pengujian lebih dari 41.000 sampel makanan bergizi gratis per tahun serta pelatihan 3.000 tenaga SPPG secara nasional. Lebih jauh, kolaborasi BBPOM di Makassar dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Satgas MBG membuka peluang penguatan jejaring lintas sektor dalam tata kelola pangan bergizi, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan siap saji. Peran aktif BBPOM di Makassar dalam memberikan pendampingan teknis dan asistensi keamanan pangan kepada penyelenggara MBG juga diharapkan dapat menekan risiko kontaminasi, meningkatkan kesadaran higienitas, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran program secara akuntabel. Dengan demikian, BBPOM di Makassar menjadi salah satu pilar keandalan pemerintah daerah dalam menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan teknis yang konsisten, sinergi lintas sektor yang kuat, dan kehadiran SDM pengawasan yang kompeten menjadikan BBPOM di Makassar mitra strategis pemerintah dalam memastikan tersedianya pangan bergizi yang aman, bermutu, dan berdaya saing bagi generasi penerus bangsa.

C. Peluang Pemanfaatan Teknologi Analisis untuk Penguatan Standar Kemampuan Laboratorium

Perkembangan teknologi analisis laboratorium pada tingkat nasional dan global memberikan peluang signifikan bagi Balai Besar POM di Makassar untuk memperkuat pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Hasil Monitoring dan Evaluasi SKL bulan November Tahun 2025 menunjukkan capaian pemenuhan SKL sebesar 78,60%, atau 108,12% terhadap target bulan November tahun 2025, dengan capaian kumulatif 108,12% terhadap target tahun 2025. Selain itu, capaian pada komponen peralatan (85,60%) dan kompetensi analis (80%) mencerminkan kesiapan laboratorium dalam mengadopsi instrumen dan metode analitis yang lebih modern.

Kemajuan teknologi seperti sistem otomasi laboratorium, perangkat validasi metode berbasis digital, dan instrumen analitik berkapasitas tinggi berpotensi mempercepat pemenuhan standar metode terverifikasi, meningkatkan efisiensi proses pengujian, serta memperkuat konsistensi implementasi ISO/IEC 17025:2017. Dengan demikian, pemanfaatan kemajuan teknologi analisis menjadi salah satu peluang strategis bagi BBPOM di Makassar untuk meningkatkan kualitas dan keandalan hasil laboratorium, memperluas ruang lingkup pengujian, dan memperkuat dukungan terhadap pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan.

D. Dukungan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional

Agenda Reformasi Birokrasi Nasional memberikan peluang strategis bagi Balai Besar POM di Makassar untuk memperkuat transformasi organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mengakselerasi digitalisasi layanan pengawasan obat dan makanan. Komitmen pemerintah pusat terhadap Reformasi Birokrasi (RB) semakin diperkuat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, yang memberikan acuan pelaksanaan RB nasional pada masa transisi 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menekankan birokrasi yang kolaboratif, adaptif, transparan, dan berbasis digital, serta mendorong modernisasi layanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kebijakan nasional ini sejalan dengan arah penguatan pengawasan obat dan makanan, khususnya integrasi sistem informasi, percepatan proses pelayanan publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar memiliki kekuatan institusional yang signifikan melalui keberhasilannya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat ini merupakan pengakuan nasional atas komitmen dan konsistensi BBPOM di Makassar dalam membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, berintegritas tinggi, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencapaian WBBM mencerminkan telah terinternalisasinya nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam budaya kerja organisasi. Seluruh proses bisnis, mulai dari pengawasan Obat dan Makanan, pelayanan publik, hingga pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan, telah dijalankan dengan menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi ini menjadi fondasi kuat dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BBPOM di Makassar.

Keberhasilan meraih predikat WBBM juga menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta mekanisme pengawasan internal yang diterapkan secara konsisten. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan kemudahan akses layanan, kejelasan prosedur, kepastian waktu, serta responsivitas petugas menjadi bagian tidak terpisahkan dari capaian tersebut. Hal ini memperkuat peran BBPOM di Makassar sebagai unit pelaksana teknis yang mampu memberikan pelayanan pengawasan Obat dan Makanan secara profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Predikat WBBM menjadi modal strategis bagi BBPOM di Makassar dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan serta penguatan transformasi organisasi pada periode perencanaan 2025–2029. Dengan legitimasi sebagai unit kerja berpredikat WBBM, BBPOM di Makassar memiliki posisi yang kuat untuk mendorong inovasi pelayanan, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan secara berkelanjutan.

E. Peluang Pertumbuhan Pasar Domestik dan Peningkatan Peran Fasilitas BBPOM Makassar

Pertumbuhan demografi di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan potensi pasar domestik yang sangat besar bagi pengembangan industri Pangan Olahan dan kosmetik serta Obat Bahan Alam. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 9,46 juta jiwa terdiri dari 4,70 juta laki-laki dan 4,76 juta perempuan dengan laju pertumbuhan 1,2% per tahun, menandakan peningkatan berkelanjutan pada jumlah konsumen potensial.

Komposisi penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) menjadikan kelompok ini sebagai segmen utama dalam konsumsi produk kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan bernilai tambah. Dominasi usia produktif tersebut mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin sadar terhadap aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk. Di sisi lain, tingkat urbanisasi yang terus meningkat, khususnya di kawasan perkotaan seperti Makassar dan sekitarnya, menunjukkan transformasi sosial-ekonomi menuju gaya hidup yang lebih modern, praktis, dan berorientasi pada produk yang higienis serta aman.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada kisaran menengah-atas menunjukkan daya beli masyarakat yang relatif baik. Kondisi ini memperkuat kemampuan pasar domestik dalam menyerap produk farmasi, kosmetik, dan pangan olahan, termasuk produk berbasis sumber daya lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Kombinasi antara pertumbuhan demografi, peningkatan urbanisasi, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi pasar domestik yang besar dan terus berkembang bagi sektor industri Obat dan Makanan.

Dalam konteks tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai ketentuan. Peran ini dijalankan melalui penguatan pengawasan pre-market dan post-market, peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta fasilitasi perizinan bagi industri dan UMKM. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan melindungi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan perluasan akses pasar domestik bagi produk Obat dan Makanan yang aman dan berdaya saing.

Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan demografi yang dinamis, daya beli masyarakat yang meningkat, dan pengawasan mutu yang semakin kuat menciptakan peluang strategis bagi BBPOM Makassar untuk memperluas peran pembinaan serta pengawasan terhadap industri lokal yang berorientasi pada pasar domestik. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga pengawas ini diharapkan mampu mendorong

pertumbuhan sektor kosmetik, dan pangan olahan di Sulawesi Selatan menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk kesehatan dan pangan yang terpercaya.

1.2.1.4 Ancaman (Threat)

Ancaman yang dihadapi BBPOM di Makassar bersifat multidimensional, mencakup aspek regulasi, teknologi, ekonomi, geografis, dan sosial. Kompleksitas tersebut menuntut penguatan pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat tetap optimal di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

1. Peningkatan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi ketentuan

Peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, palsu, dan tidak memenuhi ketentuan masih menjadi ancaman utama di wilayah Sulawesi Selatan. Jalur distribusi yang beragam—melalui pelabuhan laut, bandara, jalur darat antarkabupaten, serta platform daring—meningkatkan risiko masuk dan beredarnya produk berisiko tinggi. Dinamika ini menuntut pengawasan yang lebih intensif dan responsif, sementara modus pelanggaran terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi.

2. Ancaman Peredaran Produk Ilegal dan Palsu Melalui *Platform Daring*

Perkembangan teknologi digital di era society 5.0 telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam pembelian produk sediaan farmasi, kosmetik, dan pangan olahan. Transaksi melalui *platform e-commerce* kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Sulawesi Selatan, yang setiap harinya dapat mengakses beragam produk hanya dengan sentuhan layar. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa meningkatnya peredaran produk ilegal dan palsu melalui kanal daring, yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks nasional, BPOM RI mencatat 79.015 konten obat dan makanan ilegal beredar di platform e-commerce selama semester I tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berupa kosmetik (43%), suplemen kesehatan (28%), dan obat tradisional (18%) yang dijual tanpa izin edar resmi. Pola ini juga tercermin di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pintu utama peredaran Obat dan Makanan di Kawasan Indonesia Timur, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar berhasil mengidentifikasi sebanyak 123 produk Obat dan Makanan ilegal selama Semester I Tahun 2025. Temuan tersebut terdiri atas 6 produk obat, 49 produk obat bahan alam, 54 produk kosmetik, 12 produk suplemen kesehatan, dan 2 produk obat reguler yang beredar tanpa izin edar yang sah. Komposisi temuan ini menunjukkan bahwa produk kosmetik, obat bahan

alam, dan suplemen kesehatan masih menjadi kelompok produk yang paling dominan dalam peredaran ilegal di wilayah Sulawesi Selatan.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peredaran Obat dan Makanan ilegal, khususnya melalui sarana peredaran daring, masih menjadi tantangan serius bagi pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Pola pelanggaran yang ditemukan menunjukkan kecenderungan pemanfaatan marketplace dan media sosial sebagai saluran distribusi utama, dengan karakteristik pelaku usaha yang relatif mudah berpindah akun dan sulit ditelusuri secara cepat.

Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas patroli siber, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka menekan peredaran Obat dan Makanan ilegal di wilayah Sulawesi Selatan. Hasil temuan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi BBPOM di Makassar untuk terus mengembangkan strategi pengawasan yang adaptif, responsif, dan berbasis data guna melindungi masyarakat dari risiko konsumsi Obat dan Makanan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Dengan demikian, peredaran produk ilegal dan palsu melalui platform daring merupakan ancaman multidimensi yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga integritas pasar domestik dan reputasi produk dalam negeri. Upaya BBPOM Makassar perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan deteksi digital, penguatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta optimalisasi sistem pelaporan dan tindak lanjut hukum. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan efek jera, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap produk sediaan farmasi, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Ancaman Krisis Kesehatan Global dan Penyakit Baru

Krisis kesehatan global dan munculnya penyakit baru (*emerging infectious diseases*) merupakan ancaman strategis yang mempengaruhi stabilitas sistem pengawasan obat dan makanan, termasuk di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2024), lebih dari 30 penyakit menular baru telah muncul dalam tiga dekade terakhir, dengan 60–75 % di antaranya berasal dari hewan (zoonosis). Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI (2024) mencatat bahwa sekitar 60 % penyakit infeksi pada manusia berasal dari hewan dan 75 % di antaranya merupakan infeksi baru. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyakit baru bersifat global dan terus meningkat, menuntut lembaga pengawas seperti BBPOM Makassar untuk memiliki sistem respons yang adaptif, cepat, dan berbasis bukti ilmiah.

Krisis memperlihatkan peningkatan risiko peredaran produk ilegal, penimbunan, dan pemalsuan. Laporan Tahunan BPOM RI (2021) mencatat peningkatan jumlah penindakan terhadap produk tanpa izin edar selama masa pandemi, termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini memperkuat kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih intensif dan lintas-sektor pada wilayah kerja BBPOM di Makassar.

Salah satu bentuk kesiapan adaptif lembaga ini terlihat dari penyesuaian kapasitas laboratorium. Untuk mendukung penanganan pandemi, laboratorium biologi molekuler BBPOM di Makassar yang sebelumnya digunakan untuk pengujian DNA *porcine* (kandungan babi) pada produk pangan dan kosmetik halal, dioptimalkan menjadi fasilitas pendukung uji PCR dalam mendeteksi SARS-CoV-2. Penyesuaian ini mencerminkan kemampuan lembaga dalam menerapkan prinsip *agile laboratory management*, yaitu fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya laboratorium untuk merespons kebutuhan nasional secara cepat tanpa mengabaikan fungsi utama pengawasan mutu dan keamanan produk.

Namun, pengalaman tersebut juga mengungkap adanya kerentanan sistemik seperti jumlah SDM laboratorium bersertifikasi biosafety, kapasitas peralatan untuk pengujian cepat, serta koordinasi antar-instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam menghadapi krisis kesehatan. Jika kondisi serupa terjadi pada masa depan dengan penyakit baru yang memiliki karakteristik berbeda, risiko keterlambatan deteksi maupun distribusi informasi dapat meningkat dan berdampak pada efektivitas pengawasan publik.

Dengan demikian, krisis kesehatan global dan penyakit baru perlu diantisipasi melalui penguatan *Crisis Response System* BBPOM Makassar. Upaya strategis mencakup peningkatan kapasitas laboratorium respons cepat, integrasi sistem pengawasan daring berbasis *real-time data*, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan institusi penelitian. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan lembaga dalam menjaga keamanan obat dan makanan di tengah dinamika krisis kesehatan yang semakin kompleks.

4. Perkembangan Modus Kejahatan Obat dan Pangan Olahan di Wilayah Sulawesi Selatan

Perkembangan modus kejahatan di bidang obat dan pangan olahan menjadi salah satu ancaman yang semakin dinamis bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar. Modus pelanggaran tidak lagi terbatas pada produksi dan distribusi produk tanpa izin edar, tetapi telah berkembang ke bentuk yang lebih kompleks, seperti pemalsuan label, penggunaan klaim berlebihan, pengubahan komposisi produk, serta peredaran produk ilegal melalui platform e-commerce dan media sosial. Perubahan pola ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari distribusi konvensional menuju distribusi berbasis digital yang bersifat cepat, lintas wilayah, dan sulit ditelusuri.

Sebagai wilayah strategis yang berfungsi sebagai pintu masuk dan jalur distribusi utama Obat dan Makanan di Kawasan Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi terhadap peredaran produk ilegal. Hasil pengawasan yang dipublikasikan BBPOM di Makassar menunjukkan bahwa peredaran produk ilegal masih didominasi oleh kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan, dengan kecenderungan kuat memanfaatkan kanal digital sebagai sarana pemasaran dan transaksi. Pola ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan regulasi, serta memanfaatkan celah pengawasan di ruang siber.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, BBPOM di Makassar telah melakukan penguatan pengawasan berbasis risiko melalui patroli siber, pengawasan lapangan, serta koordinasi lintas sektor dalam rangka penegakan hukum. Upaya tersebut berhasil mengidentifikasi berbagai produk Obat dan Makanan ilegal yang beredar di wilayah Sulawesi Selatan. Namun demikian, kompleksitas kejahatan berbasis digital menuntut pendekatan pengawasan yang lebih spesifik dan berbasis kemampuan investigatif teknologi informasi. Meskipun kapasitas pengawasan konvensional dan patroli siber terus ditingkatkan, tantangan internal masih dihadapi dalam bentuk keterbatasan kompetensi teknis khusus di bidang investigasi digital, seperti digital forensics, penelusuran jejak elektronik (data tracing), dan analisis pola kejahatan siber Obat dan Makanan. Keterbatasan SDM dengan keahlian khusus di bidang tersebut berpotensi mempengaruhi kecepatan identifikasi pelaku, penguatan alat bukti elektronik, serta penelusuran rantai distribusi ilegal yang beroperasi secara lintas platform dan lintas wilayah.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan strategis untuk memperkuat kapasitas internal BBPOM di Makassar dalam menghadapi kejahatan Obat dan Makanan yang semakin berbasis teknologi. Tanpa dukungan kompetensi forensik digital dan intelijen siber yang memadai, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan daring berpotensi tidak optimal, terutama dalam konteks kejahatan yang bersifat terorganisasi dan berulang. Dengan demikian, perkembangan modus kejahatan di bidang obat dan pangan olahan menuntut tidak hanya peningkatan intensitas pengawasan lapangan, tetapi juga transformasi pendekatan pengawasan menuju sistem yang lebih adaptif, berbasis teknologi, dan kolaboratif. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan investigasi digital, pengembangan analisis data pengawasan, serta penguatan jejaring kerja sama lintas sektor menjadi langkah strategis yang diperlukan agar BBPOM di Makassar mampu merespons secara efektif dinamika kejahatan Obat dan Makanan di era digital, sekaligus menjamin perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Percepatan digitalisasi perdagangan dan maraknya peredaran daring

Percepatan digitalisasi perdagangan telah mendorong pergeseran signifikan pola distribusi dan pemasaran produk Obat dan Makanan dari jalur konvensional ke kanal daring, termasuk marketplace, media sosial, dan platform pesan instan. Transformasi ini menghadirkan tantangan strategis bagi pengawasan Obat dan Makanan karena karakteristik peredaran daring yang bersifat lintas wilayah, cepat, anonim, dan sulit ditelusuri. Pelaku usaha yang tidak patuh memanfaatkan kemudahan akses digital untuk memasarkan produk tanpa izin edar, tanpa informasi yang memadai, serta dengan klaim manfaat yang berlebihan dan menyesatkan.

Dalam praktiknya, peredaran produk Obat dan Makanan secara daring seringkali tidak disertai kejelasan identitas pelaku usaha, alamat produksi, maupun legalitas produk. Informasi yang ditampilkan pada etalase digital kerap tidak mencerminkan kondisi produk sebenarnya, termasuk ketidaksesuaian antara komposisi, label, dan klaim yang disampaikan kepada konsumen. Kondisi ini meningkatkan risiko konsumsi produk yang

tidak aman dan tidak bermutu, khususnya pada kelompok produk berisiko tinggi seperti kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan. Maraknya peredaran daring juga mempersulit pengawasan konvensional karena sifat transaksi yang bersifat real time dan dinamis, dengan akun penjual yang dapat dengan mudah dibuat, diubah, atau ditutup dalam waktu singkat. Pola ini menyulitkan proses penelusuran rantai distribusi, pengumpulan alat bukti, serta penindakan terhadap pelaku yang beroperasi lintas platform dan lintas wilayah administratif. Selain itu, algoritma promosi digital dan fitur pemasaran berbayar mempercepat penyebaran produk ilegal kepada konsumen yang lebih luas dalam waktu singkat. Ancaman ini semakin kompleks dengan adanya keterbatasan kewenangan dan kapasitas pengawasan di ruang siber yang memerlukan pendekatan khusus, termasuk patroli siber berkelanjutan, analisis data digital, serta koordinasi intensif dengan penyelenggara platform dan aparat penegak hukum. Tanpa penguatan pengawasan berbasis teknologi dan intelijen digital, peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring berpotensi terus meningkat dan mengurangi efektivitas upaya perlindungan masyarakat. Dengan demikian, percepatan digitalisasi perdagangan dan maraknya peredaran daring menjadi ancaman strategis yang menuntut transformasi pendekatan pengawasan Obat dan Makanan. BBPOM di Makassar perlu mengantisipasi ancaman ini melalui penguatan pengawasan berbasis risiko dan teknologi, peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan siber, serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di pasar digital dan fisik secara berkelanjutan.

6. Kompleksitas geografis dan disparitas akses wilayah

Karakteristik geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas wilayah daratan yang luas, kawasan pegunungan, serta wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas merupakan ancaman strategis bagi efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat keterjangkauan pengawasan antar wilayah, terutama pada daerah terpencil dan kepulauan yang memerlukan waktu, biaya, dan dukungan logistik yang lebih besar untuk dijangkau secara rutin. Disparitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berpotensi menciptakan celah pengawasan yang dimanfaatkan oleh pelaku peredaran Obat dan Makanan ilegal. Daerah dengan akses terbatas cenderung memiliki frekuensi pengawasan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan, sehingga meningkatkan risiko beredarnya produk tanpa izin edar, produk kedaluwarsa, atau produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi yang memenuhi standar di wilayah terpencil.

Selain itu, kompleksitas geografis juga mempengaruhi kecepatan respon terhadap temuan pengawasan dan pengaduan masyarakat. Proses tindak lanjut, pengambilan sampel, serta penarikan produk bermasalah memerlukan waktu yang lebih panjang ketika lokasi berada di wilayah dengan akses terbatas. Hal ini berpotensi meningkatkan durasi paparan risiko produk berbahaya kepada masyarakat sebelum tindakan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

Ancaman tersebut juga berdampak pada efektivitas koordinasi lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan operasi pengawasan terpadu dan penegakan hukum. Perbedaan kapasitas dan ketersediaan sumber daya antar daerah dapat mempengaruhi keseragaman pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat dan perencanaan berbasis risiko wilayah, disparitas pengawasan berpotensi semakin melebar.

Dengan demikian, kompleksitas geografis dan disparitas akses wilayah menuntut pendekatan pengawasan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis risiko. Penguatan pemetaan wilayah rawan, optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengawasan jarak jauh, serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat setempat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan celah pengawasan dan memastikan perlindungan masyarakat terhadap risiko Obat dan Makanan yang tidak aman dan tidak bermutu secara merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

7. Perubahan cepat inovasi produk dan teknologi produksi

Perkembangan inovasi produk dan teknologi produksi Obat dan Makanan berlangsung semakin cepat, ditandai dengan munculnya berbagai formulasi baru, diversifikasi bahan baku, serta penerapan teknologi produksi yang semakin kompleks. Pemanfaatan bahan alam lokal, teknologi ekstraksi modern, formulasi berbasis kombinasi bahan, hingga penggunaan teknologi digital dalam proses produksi dan pemasaran menghadirkan tantangan baru bagi sistem pengawasan Obat dan Makanan. Perubahan yang berlangsung cepat ini berpotensi melampaui kesiapan regulasi, standar pengujian, serta kapasitas pengawasan apabila tidak diantisipasi secara adaptif.

Inovasi produk yang berbasis bahan alam dan teknologi baru seringkali menghadirkan karakteristik risiko yang berbeda dibandingkan produk konvensional. Variasi mutu bahan baku, perbedaan metode pengolahan, serta potensi kontaminasi atau interaksi antar bahan memerlukan pendekatan pengujian dan evaluasi keamanan yang lebih spesifik. Dalam kondisi tertentu, ketersediaan metode uji, standar rujukan, serta kompetensi teknis yang sesuai masih memerlukan penguatan agar dapat mengimbangi laju inovasi yang terjadi.

Selain itu, teknologi produksi yang semakin maju memungkinkan pelaku usaha, termasuk skala UMKM, untuk menghasilkan produk dengan volume dan variasi yang lebih besar dalam waktu singkat. Apabila tidak disertai pemahaman dan penerapan standar Cara Produksi yang Baik secara konsisten, kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan keamanan dan mutu. Tantangan ini semakin kompleks ketika inovasi dilakukan tanpa melalui proses perizinan dan evaluasi yang memadai.

Perubahan cepat inovasi juga berdampak pada dinamika pengawasan pre-market dan post-market. Produk baru dengan klaim inovatif dan teknologi produksi yang belum umum digunakan membutuhkan proses evaluasi yang lebih mendalam dan waktu yang lebih panjang, sementara tekanan pasar mendorong percepatan peredaran produk. Ketidakseimbangan antara kecepatan inovasi dan kesiapan sistem pengawasan berpotensi menciptakan

celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak patuh.

Dengan demikian, perubahan cepat inovasi produk dan teknologi produksi menjadi ancaman strategis bagi efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas pengawasan yang adaptif melalui pembaruan regulasi dan pedoman teknis, peningkatan kompetensi SDM, penguatan laboratorium dan metode pengujian, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Tanpa langkah antisipatif yang terencana, laju inovasi yang tidak diimbangi kesiapan pengawasan berpotensi meningkatkan risiko terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

BAB 2
VISI, MISI, SASARAN
PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPOM secara optimal, maka Balai Besar POM di Makassar berkomitmen menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

2.1 VISI BPOM 2025 - 2029

Sebagai lembaga dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk dapat memastikan keamanan, khasiat/manfaat, mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Seiring dengan meningkatnya dinamika lingkungan strategis, tantangan global, dan kompleksitas peredaran obat dan makanan, BPOM telah melakukan penyesuaian dan merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat

terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

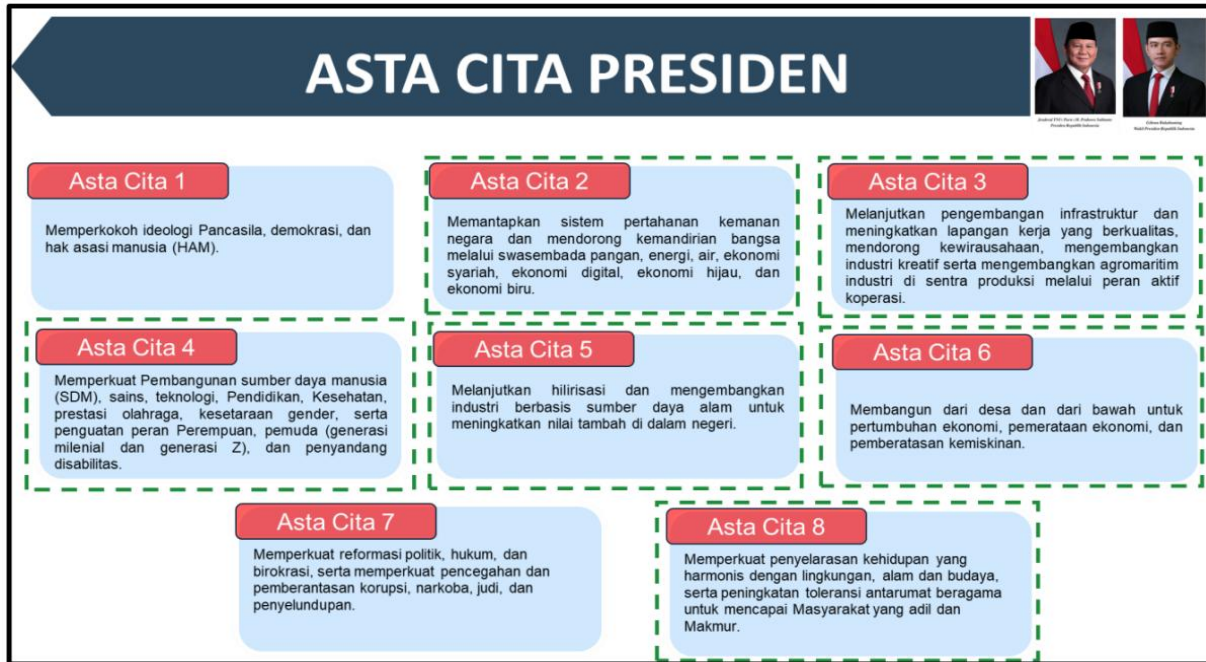
Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing

Peran BBPOM di Makassar adalah menerjemahkan dan mewujudkan tujuan Visi tersebut menjadi aksi nyata dan kebijakan operasional di tingkat regional, dengan fokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta industri di wilayah kerjanya. Seluruh aspek dalam Visi BPOM periode 2025-2029 merupakan mandat strategis nasional yang diimplementasikan secara langsung oleh Balai Besar POM (BBPOM) di Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBPOM di Makassar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perlindungan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. BBPOM di Makassar secara konsisten menerapkan standar mutu dalam pengawasan produk yang beredar maupun diproduksi secara lokal, memastikan keamanan dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bagi konsumen di Sulawesi Selatan. Selain fungsi pengawasan, BBPOM di Makassar juga aktif memfasilitasi dan membina industri daerah, termasuk UMKM, agar mampu memenuhi standar regulasi, sehingga dapat bersaing secara sehat tidak hanya di pasar lokal dan nasional, tetapi juga siap menembus kancah internasional.

2.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif

dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Misi BPOM untuk periode 2025-2029 adalah panduan strategis yang wajib diimplementasikan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Balai Besar POM (BBPOM) di Makassar, sebagai bentuk dukungan nyata dalam mencapai Visi nasional.

Balai Besar POM di Makassar secara aktif menterjemahkan dan

mengimplementasikan empat Misi strategis BPOM di tingkat regional melalui langkah-langkah konkret dan terukur di wilayah Sulawesi Selatan.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025- 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu : Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM : Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan : Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima : Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai Besar POM di Makassar berkomitmen penuh mendukung pencapaian tujuan strategis Badan POM. Seluruh program, kegiatan, dan inovasi di lingkungan BBPOM di Makassar diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan pre market dan post market, peningkatan kapasitas laboratorium, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, pendampingan UMKM untuk percepatan pemenuhan standar keamanan pangan. BBPOM di Makassar secara konsisten melaksanakan edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat guna meningkatkan literasi dan partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Makassar, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Makassar akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut :

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan

profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel : Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Makassar periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i>	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
		4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 7. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi		

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
				<i>Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i>		

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
				14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)		
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	Penguatan penindakan terhadap	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber,

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan	intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: 1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan</i>	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
	<i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>yang dikawal sesuai standar</i> 2. <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i> 3. <i>Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan</i>			peningkatan daya saing Obat dan Makanan	
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan</i>	Meningkatnya efektivitas KIE	1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i>	Peningkatan perlindungan masyarakat melalui penguatan KIE obat dan makanan, perluasan pembudayaan keamanan pangan di sekolah, desa dan pasar	Penguatan kapasitas penyuluh dan KIE berbasis risiko, kolaborasi lintas sektor, integrasi program keamanan pangan pada pendidikan, pasar dan desa binaan

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
	<i>Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Olahan yang Aman dan Bermutu</i>		<i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>		
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima	<i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik 2. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran (Mengupayakan
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. <i>Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> 2. <i>Nilai AKIP UPT BPOM</i> 3. <i>Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> 4. <i>Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i>		

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Indikator Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar	Kebijakan BBPOM di Makassar	Strategi BBPOM di Makassar
						n kegiatan berjalan dengan optimal baik secara online maupun offline)

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BBPOM di Makassar 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran kegiatan tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Makassar untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Strategis BBPOM di Makassar

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara online	Penguatan pengawasan peredaran online melalui penelusuran digital terstruktur, peningkatan <i>cyber patrol</i> dan tindak lanjut inspeksi berdasarkan temuan	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Awareness Saryankes untuk melaporkan KTD/ESO ke BPOM masih rendah	Melaksanakan sosialisasi dan refreshment bimtek Farmakovigilans secara berkala dan memperkuat monitoring dan pendampingan pelaporan faskes	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Meningkatnya jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)	Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bimbingan teknis terhadap Pengawas, SPPI, SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP.	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Hasil investigasi KLB tidak lengkap, sehingga penetapan sumber, penyebab, dan tindakan korektif tidak memadai dan berpotensi menghambat proses tindak lanjut sesuai ketentuan.	Peningkatan kompetensi petugas dalam pengumpulan bukti dan data epidemiologis, serta koordinasi yang lebih intensif dengan dinas terkait dan fasilitas pelayanan kesehatan	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Pertemuan advokasi dan Bimtek Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan. b. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan koordinasi lintas sektor dan pemantauan berkala progres penyelesaian rekomendasi	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi

		Terdapat potensi terjadinya <i>fraud</i> dalam upaya mengubah atau memanipulasi kesimpulan hasil pengawasan	a. Menumbuhkan budaya malu untuk menerima gratifikasi b. Monitoring aplikasi Masirika dan Tallapa	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang berlokasi di daerah terpencil tidak terjangkau pengawasan	Melaksanakan inovasi Mantappol untuk pengawasan secara terpadu	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Masih terdapat sarana distribusi farmasi yang tidak terjangkau melalui inovasi MANTAPPOL, sehingga pengawasan tidak optimal dan potensi pelanggaran tidak teridentifikasi	Memperluas cakupan MANTAPPOL dengan pemetaan ulang sarana distribusi, penambahan titik prioritas berbasis risiko, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh sarana terpantau secara efektif	Fungsi Pemeriksaan – Inspeksi
		Pelayanan prima tidak diterapkan secara maksimal	Peningkatan kompetensi petugas Yanblik melalui IDEAS dan kelas belajar Yanblik setiap hari Senin dan umpan balik untuk memastikan pelayanan diberikan secara konsisten, cepat, dan sesuai ketentuan.	Fungsi Pemeriksaan dan Infokom
		Terdapat perbedaan hasil evaluasi penandaan antara balai dan pusat, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan data, potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan	Peningkatan koordinasi dan konsultasi rutin antara balai dan pusat serta pelaksanaan <i>review</i> bersama terhadap kasus penandaan	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
		Tingginya persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang tidak memenuhi ketentuan	Memperkuat pengawasan melalui kegiatan pengawasan bersama (joint inspection) dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawasan Tertib Niaga)	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi

	Masih tingginya penyerahan antibiotik secara bebas di fasilitas pelayanan kefarmasian	Memperkuat pengawasan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian melalui inspeksi berbasis risiko, pembinaan dan sosialisasi ketentuan pengelolaan antibiotik di saryanfar dan pengendalian Antimicrobial Resistance serta koordinasi dengan dinas kesehatan dan organisasi profesi	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
	Penyelesaian sampel makanan yang overtime	a. Melakukan pengaturan jumlah sampel DAK yang masuk sesuai dengan sumber daya laboratorium, b. Menjalin kerjasama melalui Jejaring Laboratorium Penguji Sulawesi Selatan	Fungsi Pengujian
	Tidak dilakukannya pengujian terhadap seluruh Parameter Uji Kritis (PUK) karena keterbatasan peralatan	Mencari metode alternatif dan mengusulkan perubahan pada Pedoman Sampling	Fungsi Pengujian
	Terdapat produk PIRT yang diuji berulang melalui sampling internal (PIRT) dan eksternal (DAK)	Koordinasi data sampling PIRT antara pihak BBPOM di Makassar dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota	Fungsi Pengujian
	Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan ruang lingkup pengujian sulit dipenuhi	a. Penyusunan rekomendasi terhadap pemenuhan peralatan utama yang belum tercapai b. Pengajuan anggaran pengadaan termasuk usulan kebutuhan baku pembanding dan reagensia c. Permintaan sampel uji tertentu (sampling) kepada fungsi inspeksi	Fungsi Pengujian

		Program keamanan pangan tidak dilaksanakan secara terpadu oleh OPD - OPD terkait, masing-masing berjalan sesuai dengan kewenangannya.	a. Sosialisasi Surat Edaran Mendagri tentang TKPPOM, b. Penguatan koordinasi lintas OPD melalui Advokasi dan Pendampingan pelaksanaan kegiatan, pembentukan SK TKPPOM	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Sarana produksi pangan fortifikasi tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan	a. Memberikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana berupa surat peringatan / peringatan keras b. Penguatan mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi, pemberian batas waktu dan pengingat resmi kepada pemilik sarana produksi c. Sosialisasi pada sarana produksi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait	Fungsi Pemeriksaan - Inspeksi
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kegagalan petugas dalam menemukan pelaku kejahatan dan mengamankan barang bukti pada tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	a. Pengendalian dokumen surat tugas dan laporan yang bersifat rahasia b. Optimalisasi penggunaan teknologi intelijen siber dan pemetaan jaringan distribusi ilegal, serta penguatan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memperluas cakupan investigasi	Fungsi Penindakan
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Peta kerawanan kasus yang tidak akurat atau kurang mencerminkan kondisi faktual suatu wilayah	a. Penyempurnaan metodologi pemetaan melalui pemutakhiran data lapangan, integrasi sumber data lintas sektor, serta peningkatan kualitas analisis berbasis risiko. b. Evaluasi proses penyusunan peta kerawanan kasus	Fungsi Penindakan

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerbitan sertifikat CPOTB bertahap dan SPA CPKB tidak sesuai timeline	a. Memastikan sarana dan prasana serta dokumentasi pelaku usaha telah siap b. Mengarahkan pengajuan ke sistem melalui inovasi pedang puang basok (pendampingan pelaku usaha)	Fungsi Pemeriksaan - Sertifikasi
		Ketidakpatuhan Pelaku Usaha dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan sarana untuk keperluan sertifikasi	a. pendampingan pelaku usaha melalui inovasi pedang puang basok dan program PAGCC b. penguatan mekanisme pembinaan dan komunikasi kepada Pelaku Usaha, penetapan batas waktu tindak lanjut yang tegas	Fungsi Pemeriksaan - Sertifikasi
6	Meningkatnya efektivitas KIE	Pelaksanaan KIE di lapangan terbuka yang rentan dengan perubahan cuaca	Pemilihan lokasi alternatif yang lebih terlindungi, penyediaan fasilitas penunjang (tenda dsb), penyesuaian jadwal kegiatan berdasarkan prakiraan cuaca, serta optimalisasi media digital sebagai cadangan penyampaian KIE apabila kegiatan lapangan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.	Fungsi Infokom
		Pelaksanaan Program PJAS Aman tidak terlaksana dengan baik dan target tiap tahapan tidak tercapai	penguatan perencanaan dan koordinasi antar-tim pelaksana, pemantauan progres secara berkala, penyesuaian strategi implementasi berdasarkan evaluasi setiap tahapan, serta peningkatan pendampingan	Fungsi Infokom
		Kemanan pangan tidak diterapkan secara konsisten dalam lingkungan desa	Pelaksanaan bimbingan teknis kader keamanan pangan, sosialisasi dan pelatihan keamanan pangan, pemberian reward kepada kader, memotivasi komunitas desa untuk terus berinovasi, pemantauan dan evaluasi berkala	Fungsi Infokom
		Tahapan Pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman tidak sesuai jadwal	penyusunan perencanaan kegiatan yang lebih realistis dan terstruktur, pelaksanaan koordinasi secara rutin dengan pihak terkait, pemantauan progres pelaksanaan secara berkala, serta penyesuaian jadwal dan strategi pelaksanaan	Fungsi Infokom

7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik berpotensi turun karena kualitas, kecepatan, dan konsistensi layanan tidak terjaga	Peningkatan kompetensi petugas Yanblik melalui IDEAS dan kelas belajar Yanblik setiap hari Senin, Monitoring dan evaluasi rutin serta penguatan sistem manajemen layanan	Fungsi Infokom
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Belum dilakukan sertifikasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan untuk TA 2024	pelaksanaan sertifikasi PPK dan Pejabat Pengadaan secara tepat waktu melalui perencanaan jadwal pelatihan dan sertifikasi, monitoring progres sertifikasi, serta pendampingan dan penguatan kompetensi	Bagian Tata Usaha
		Komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal menurun;	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait: a. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis; b. Upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya; c. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan informasi: 1) Upaya dan/atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai; 2) Data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; 3) Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.	Bagian Tata Usaha

		Keterlambatan Pendaftaran Kontrak	Penetapan prosedur pendaftaran kontrak yang jelas dan terjadwal, peningkatan koordinasi antar-unit terkait, monitoring progres pendaftaran secara berkala, serta penerapan pengingat dan mekanisme eskalasi untuk memastikan kontrak terdaftar tepat waktu	Bagian Tata Usaha
		Tanggung jawab penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko yang masih berada pada tim manajemen risiko	Pelibatan tim manajemen representatif dalam seluruh tahapan manajemen risiko, termasuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko, melalui sosialisasi peran dan mekanisme kolaboratif untuk memastikan keputusan manajemen berbasis risiko lebih komprehensif dan terintegrasi.	Bagian Tata Usaha



BAB 3
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

- 2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*:** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
- 3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
- 4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
- 5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

- 6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta

penguatan kajian kebijakan berbasis data

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Farmasi dan Pangan Olahan	kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Makassar

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Makassar disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit tidak hanya selaras dengan strategiBPOM 2025-2029, tetapi juga responsif terhadap isu spesifik di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Berikut adalah arah kebijakan BPOM yang didukung oleh BBPOM di Makassar, sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Adapun Strategi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar Tahun 2025 – 2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penguatan pengawasan terpadu *pre-post market* dengan penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko dan wilayah rawan
2. Mengoptimalkan patroli siber dan pengawasan lapangan berbasis risiko, serta memperkuat pemanfaatan data pengawasan sebagai sistem peringatan dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui peran PPNS
3. Intensifikasi pendampingan dan pemenuhan perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada UMKM serta transformasi perluasan jangkauan jenis skala usaha dan jenis pendampingan melalui inovasi Pedang Puang Basok
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan inovasi MANTAPPOL SULSEL dan Layanan Starling
5. Penguatan Kemitraan dengan membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Asosiasi dan Perguruan Tinggi
6. Penguatan pengelolaan SDM dengan mengadakan pengembangan kompetensi baik secara internal maupun eksternal dan peningkatan kualitas pengujian dengan alat laboratorium yang berteknologi tinggi
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya inovasi layanan yang terdapat di BBPOM di Makassar sebagai upaya percepatan layanan publik berbasis elektronik

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Makassar 2025-2029

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan terpadu <i>pre-post market</i> dengan penetapan prioritas pengawasan berbasis risiko dan wilayah rawan
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Mengoptimalkan patroli siber dan pengawasan lapangan berbasis risiko, serta memperkuat pemanfaatan data pengawasan sebagai sistem peringatan dini melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan efektivitas penegakan hukum melalui peran

	PPNS
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pendampingan dan pemenuhan perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada UMKM serta transformasi perluasan jangkauan jenis skala usaha dan jenis pendampingan melalui inovasi Pedang Puang Basok
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan inovasi MANTAPPOL SULSEL dan Layanan Starling
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Kemitraan dengan membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Asosiasi dan Perguruan Tinggi
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dengan mengadakan pengembangan kompetensi baik secara internal maupun eksternal dan peningkatan kualitas pengujian dengan alat laboratorium yang berteknologi tinggi
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya inovasi layanan yang terdapat di BBPOM di Makassar sebagai upaya percepatan layanan publik berbasis elektronik

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi BBPOM di Makassar juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Priode Pelaksanaan 2025-2029 tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Makassar melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar

POM di

Makassar mencakup pengawasan *pre - post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-*

market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Makassar tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Makassar

BAB 4
TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS
2025 - 2029
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Makassar dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BBPOM di Makassar menetapkan Sasaran Kegiatan, indikator kinerja, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Sasaran Kegiatan, IKU dan Target BBPOM di Makassar

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.50	89.75	91.00	92.25	93.50	Persentase
		2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30	Persentase
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93	Persentase
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	Persentase
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95	Persentase
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	85	86	88	90	Persentase
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00	94.67	95.33	96.00	96.67	Persentase
		8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95	Persentase

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	94.75	95.75	96.75	97.25	Persentase
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90	Persentase
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	85.29	87.29	89.29	90.49	Persentase
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84	Persentase
		13 Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100	Persentase
		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.90	82.50	84.50	86.80	89.30	Nilai
		15 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.76	17.65	29.41	41.18	70.59	Persentase
		16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	81	82	83	84	Persentase
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Fortifikasi Pangan	17 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	62	68	70	76	Persentase
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	87.51	88.38	89.24	90.11	Nilai

RENCANA STRATEGIS 2025-2029 BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Satuan
			2025	2026	2027	2028	2029	
		19 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	18	22	25	28	Nilai
		20 Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	8	Nilai
		21 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	4	4	Nilai
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.39	30.30	50.00	72.73	96.97	Persentase
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	84	86	88	90	Persentase
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94	Persentase
7	Layanan Publik UPT yang prima	25 Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	Nilai
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	91,50	92	92,50	93	Nilai
		27 Nilai AKIP UPT BPOM	82	82,50	83	83,50	84	Nilai
		28 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5	Nilai
		29 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	Nilai

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan maka perlu didukung oleh anggaran sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Periode 2025 – 2029

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	54.829.354	46.828.978	51.511.876	59.238.657	71.086.389
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17.245.930	19.169.577	21.086.535	24.249.515	29.099.418
Total	72.075.284	65.998.555	72.598.411	83.488.172	100.185.806

Sumber: DIPA Awal Tahun 2025 dan Pagu Indikatif TA 2026

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025-2029

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	69.826.361	63.749.632	70.349.488	81.239.249	97.936.883
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.248.923	2.248.923	2.248.923	2.248.923	2.248.923
Total	72.075.284	65.998.555	72.598.411	83.488.172	100.185.806

Sumber: DIPA Awal Tahun 2025 dan Pagu Indikatif TA 2026

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BBPOM di Makassar dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Makassar yang ingin dicapai.

BAB 5

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

BAB V **PENUTUP**

Renstra Balai Besar POM di Makassar tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Perencanaan Kinerja Balai Besar POM di Makassar merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Renstra Balai Besar POM di Makassar mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2025-2029 serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Renstra BBPOM di Makassar disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh kegiatan dan kebijakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar agar selaras dengan arah kebijakan strategis Badan POM secara nasional. Dokumen ini menjadi komitmen bersama seluruh jajaran BBPOM di Makassar untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan partisipasi aktif seluruh pegawai serta dukungan dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, BBPOM di Makassar berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan demikian, Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi terwujudnya Balai Besar POM di Makassar yang profesional, berintegritas, dan responsif, dalam rangka mendukung visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

LAMPIRAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029 **BALAI BESAR POM DI MAKASSAR**

LAMPIRAN

Lampiran I

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI MAKASSAR TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
BBPOM di Makassar								72.075.284	65.998.555	72.598.411	83.488.172	100.185.806	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								54.829.354	46.828.978	51.511.876	59.238.657	71.086.389	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	88.50	89.75	91.00	92.25	93.50						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Makassar	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	85	87	89	91	93						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Makassar	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	85	87	89	92	95						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Makassar	83.85	85	86	88	90						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	94.00	94.67	95.33	96.00	96.67						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	85	88	90	92	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	93.75	94.75	95.75	96.75	97.25						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	80	82	84	87	90						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	83.29	85.29	87.29	89.29	90.49						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Makassar	80	81	82	83	84						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Makassar	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Makassar	77.90	82.50	84.50	86.80	89.30						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Makassar	11.76	17.65	29.41	41.18	70.59						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	-	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		BBPOM di Makassar	50	60	70	80	100						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Makassar	590	590	620	651	684						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		BBPOM di Makassar	1074	1083	1140	1198	1262						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Makassar	140	150	166	182	200						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		BBPOM di Makassar	780	867	921	986	1053						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		BBPOM di Makassar	204	204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		BBPOM di Makassar		1083	1083	1083	1083						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Makassar	57	62	68	70	76						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		BBPOM di Makassar	21	23	25	26	28						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Makassar	86.64	87.51	88.38	89.24	90.11						UPT BPOM

[illegible]

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				Unit Organisasi Pelaksana	
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Makassar	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BBPOM di Makassar	389	401	419	443	457						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Makassar	91	91,50	92	92,50	93						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Makassar	82	82,50	83	83,50	84						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Makassar	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Makassar	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		BBPOM di Makassar	7	19	22	25	30						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM							17.245.930	19.169.577	21.086.535	24.249.515	29.099.418	UPT BPOM	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Makassar	1	1	1	1	1						UPT BPOM